

CARA PANDANG

Edisi Desember 2020

Inspirasi Terkini!

STRATEGI SRI
BANGKIT DARI
RESESI

CAHAYA DALAM
GELAP WABAH
CORONA

HARI GURU
NASIONAL



TERCAPIT IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER

Akibat mengatur monopoli alur ekspor benih lobster, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kena "capit" KPK. Diduga mendapat uang suap Rp3,4 milyar. Jalan-jalan di Hawaii dan belanja sejumlah barang super mewah. Pulang ke Indonesia berakhir di penjara.

Mudahnya berinvestasi Reksa Dana melalui BNI Mobile Banking



#yaREKSADANAaja

BNI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Mulai kelola keuangan Anda dengan kemudahan investasi Reksa Dana melalui BNI Mobile Banking. #yaREKSADANAaja

Segera unduh BNI Mobile Banking di Google Play dan App Store.

Step by Step Top Up Reksadana :

1. Buka aplikasi mobile banking.
2. Pilih BNI Mobile.
3. Input UserID dan MPIN anda.
4. Pilih menu Produk & Jasa lainnya.
5. Pilih menu Reksadana.
6. Baca Surat Pernyataan Nasabah.
7. Centang pada "saya setuju dengan syarat dan ketentuan diatas", dan klik lanjut.
8. Lakukan Top Up pembelian pada produk Reksadana yang diinginkan, dan klik lanjut.
9. Masukkan nominal yang ingin anda tambahkan, password transaksi anda, dan klik lanjut.
10. Anda akan mendapatkan notif "Transaksi sedang diproses".

Step by Step Cek Saldo Investasi:

1. Buka aplikasi Mobile Banking.
2. Pilih BNI Mobile.
3. Input UserID dan MPIN anda.
4. Pilih menu Rekeningku.
5. Masuk menu Investasi.
6. Anda akan mendapatkan halaman produk reksadana yang telah anda miliki.

Bagi Anda yang belum memiliki Reksa Dana, kunjungi Kantor Cabang BNI terdekat untuk melakukan pembelian.

Info lebih lanjut mengenai Reksa Dana klik <https://reksadana.ojk.go.id> atau <https://reksadanacommunity.com/video/> atau hubungi BNI Call 1500046.

1500046
BNI Call



Top Up Reksa Dana as simple as you swap the screen! #yaREKSADANAaja

DAFTAR ISI

TAJUK

EDWARD JENNER DAN VAKSIN COVID-19 5

LAPORAN UTAMA

ATUR MONOPOLI, EDHY BERAKHIR DI BUI 10

SAYA BELANJA, MAKA SAYA ADA 12

LAPORAN KHUSUS

CAHAYA DI TENGAH GULITA WABAH CORONA 14

MENANTI KABAR BAIK UJI KLINIS SINOVAQ 18

RAGAM VAKSIN, VARIASI HARGA? 22

NASIONAL

HARI AKSARA INTERNASIONAL,

KAMPANYE PENTINGNYA LITERASI DIGITAL 30

ALTERNATIF BELAJAR ONLINE DENGAN SUBSIDI KUOTA 32

**PEMDA DIBERIKAN KEWENANGAN MENENTUKAN
BELAJAR TATAP MUKA 34**

MENDIKBUD:

**GURU ADALAH PELUKIS MASA DEPAN DAN PERADABAN
INDONESIA 38**

STRATEGI SRI BANGKIT DARI RESESI 40

INTERNASIONAL

KEMENANGAN AZERBAIJAN, SISA LUKA BAGI ARMENIA 46

DI BALIK ANTUSIASME DAN PRAGMATISME PILPRES AS 50

OPINI

JALAN TERJAL JUDICIAL REVIEW UU CIPTAKER 54

REFLEKSI HARI GURU NASIONAL

TANTANGAN GURU DI ERA DIGITAL 56

BAHASA

TRUMP YANG SENGIT, BIDEN YANG TENANG 58

RESENSI

**IJTIHAD MUHAMMADIYAH MEREKONSILIASI KONSEP
POLITIK MODERN 62**

KISAH PILU SANG BIDADARI 65

BUDAYA

MENGHIDUPKAN KESENIAN BANTENGAN 68

TEKNOLOGI

EPSON RILIS PRINTER LABELWORKS Z5000 70

ARTIS

MARIAH CAREY

**KOLABORASI BARENG ARIANA GRANDE UNTUK ACARA
NATAL 72**

KOLOM

VAKSINOMIC ILUSI KEBANGKITAN EKONOMI 74



LAPORAN UTAMA TERCAPIT IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER

Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tamparan keras bagi Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini harus bekerja keras meyakinkan publik bahwa partainya masih bersih dari korupsi.

6



**NASIONAL
RIZIEQ PULANG,
OPOSISI SENANG**

42



**ARTIS
LUNA MAYA
TIGA ATURAN PERNIKAHAN
ALA LUNA MAYA**

73

WAWANCARA

RETNO LISTYARTI

**PEMBUKAAN SEKOLAH
TERGANTUNG KESIAPAN
SEKOLAH, BUKAN ZONA**

26



Pembelajaran *Online* Tak Maksimal, Namun Perlu Tetap Dioptimalkan

Banyak orang tua yang mengeluh anaknya belajar dari rumah. Katanya tidak maksimal, signalnya sering putus-putus, lebih banyak tugas, anak malas, muda bosan dan berbagai alasan lainnya. Hemat saya, kondisi demikian sangatlah wajar. Tak ada yang menginginkan pandemi ini terjadi hingga membuat semua lembaga pendidikan di semua tingkatan harus mengubah pola pembelajarannya.

Pembelajaran melalui dalam jaringan (daring) memang belum maksimal. Apalagi harus dilakukan setiap hari dan pada setiap jam pelajaran, meski sudah dikurangi dari jam sekolah normal. Namun, belajar daring yang menyebabkan kondisi anak bosan, sangat wajar terutama bagi anak-anak yang kecerdasan psikomotoriknya lebih menonjol daripada kognitifnya.

Sebab itu, bagi para pendidik perlu mengupayakan metode pembelajaran yang inovatif agar peserta didik tidak cepat bosan. Bisa juga tidak selalu berceramah di zoom, yang memosisikan mereka untuk hanya menjadi pendengar. Buatlah pembelajaran yang partisipatoris dan mengupayakan mereka untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat di sekitarnya.

Learning by doing, belajar dengan berpraktik langsung bisa menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) lebih maksimal. Misalnya, untuk mata pelajaran Biologi, peserta didik bisa diminta untuk bertanam



atau berkebun, yang tentu disesuaikan dengan topik pelajaran dan lingkungan tempat tinggal. Lalu, pelajaran Pendidikan Agama Islam, bisa dilakukan dengan mengikutsertakan amalan ibadah orangtuanya di rumah.

Yang terpenting bagi PJJ adalah menyesuaikan topik mata pelajaran dengan kondisi lingkungan, tempat tinggal, dan usia peserta didik. Jangan sampai belajar dari rumah malah membebani pekerjaan mereka lebih banyak, apalagi menjadi pemicu anak untuk mengakhiri hidupnya seperti yang marak diberitakan beberapa waktu lalu.

Kemudian, yang juga penting, adalah peran orang tua untuk senantiasa mengawasi putra-putrinya ketika belajar. Dalam hal “mengawasi” ini, hemat saya, orang tua bisa senantiasa berkomunikasi dengan anak secara baik tentang proses belajarnya. Jangan mendikte dan mengungkapkan kekesalan kepada anak karena letih seharian di rumah. Terima kasih.

Khumairo, 21 Tahun,
Guru di SD Negeri 4 Solok,
Sumatera Selatan

CARA
PANDANG
Inspirasi Terkini!

Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab:** Yayan Sopyani, Michael Malik **Pemimpin Redaksi :** Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana :** Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur :** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis :** Hengki, Dwi Saputra, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT :** Zulfikar Iskandar **Fotografer :** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter :** Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Tebet Dalam IV Nomor 7B, RT 11/RW 01, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12081 Telp: (021) 21383521

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

EDWARD JENNER DAN VAKSIN COVID-19

Edward Jenner, berusia 47 tahun, saat menemukan vaksin pertama kali pada 1796. Dia lahir di Berkeley, Gloucestershire pada 17 Mei 1749, anak dari pendeta setempat. Sejak 14 tahun, dia sudah menekuni ilmu kedokteran, magang di berbagai tempat, serta menghabiskan sebagian besar sisa karirnya sebagai dokter di kota asalnya.

Bermula dari eksperimennya terhadap James Phipps, seorang anak berusia 8 tahun, Jenner memasukkan nanah yang diambil dari pustule cacar sapi ke dalam sayatan lengan Phipps. Hasilnya, tak disangka, percobaan itu membuktikan Phipps kebal dari cacar. Karena eksperimennya itu, Jenner disebut sebagai bapak vaksinasi cacar dan pelopor imunologi.

Pada abad ke-20, cacar dinilai sebagai pembunuh paling besar. Lebih dari 300 juta orang meninggal dunia akibat pandemi yang berkepanjangan tersebut. Namun, berkat temuan Jenner, cacar tak lagi menjadi virus menular yang berbahaya. Sebelumnya, tiga dari sepuluh anak yang tertular cacar dipastikan meninggal dunia. Menurut World Health Organization (WHO), wabah ini hilang sejak 1980 dan ini adalah kesuksesan terbesar bagi dunia kesehatan.

Kini, setelah sekitar dua abad, dunia kembali dihadapkan dengan persoalan yang sama. Pandemi kembali menyerang, namun sekarang bukan lagi cacar melainkan *Corona Virus Disease (Covid) 2019*. Virus ini telah lebih dari 1,3 juta menyebabkan nyawa melayang dan lebih dari 58 juta orang yang terinfeksi (*worldometers*, 23/11).

Dunia butuh sosok seperti Edward Jenner, yang meski dalam sejarah mendapat ejekan luas dari para kritikus, ilmuwan dan pendeta, karena dianggap telah menggunakan penyakit hewan untuk menyembuhkan orang, namun dia tetap tekun mencari bukti-bukti untuk memastikan kebenaran temuannya.

Dia menyerahkan makalah ke Royal Society pada 1797

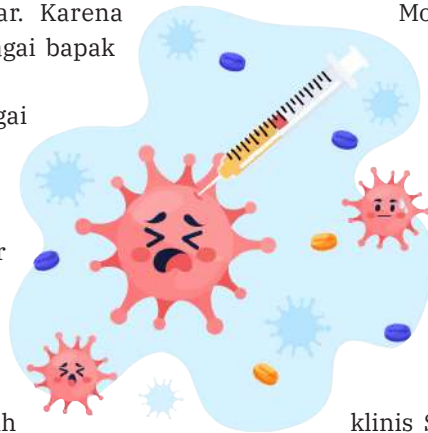
yang menjelaskan eksperimennya, tetapi diberi tahu bahwa idenya terlalu revolusioner dan dia membutuhkan lebih banyak bukti. Tanpa gentar, Jenner bereksperimen pada beberapa anak lain, termasuk putranya sendiri yang berusia 11 bulan. Pada 1798, hasil akhirnya dipublikasikan dan Jenner menciptakan kata vaksin dari bahasa Latin “vacca” untuk sapi.

Belakangan, sejumlah calon vaksin Covid-19 memang sudah ditemukan, tetapi seluruhnya masih pada tahap uji klinis. Dari China ada Sinovac, Sinapohrm/ G42 dan Cansino; di Amerika Serikat (AS) muncul Pfizer dan Moderna; dan di Rusia ada Sputnik V. Kini, masing-masing terus berlomba untuk mencapai efektifitas penyembuhan paling maksimal.

Beberapa vaksin yang tersebut di atas merupakan sejumlah vaksin yang efektifitasnya telah mencapai di atas 90 persen. Penilaian ini sejauhnyanya sudah layak, hanya menunggu tahap ketiga uji klinis, kecuali tiga vaksin dari China yang telah lebih dulu ditemukan.

Indonesia pun tengah melakukan uji klinis Sinovac pada tahap akhir, dan hasilnya masih akan diketahui akhir Desember. Hingga pada realisasi uji klinis tahap kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa uji klinis vaksin CoronaVac buatan Sinovac, yang diuji kliniskan melalui PT Bio Farma dan dikerjasamakan dengan Universitas Padjajaran (Unpad) di Bandung tak ada laporan efek samping yang serius.

Sangat mungkin, jika hingga akhir tahap uji klinis nanti tak ada persoalan yang serius, maka akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021, vaksinasi akan dilakukan kepada para tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan semua tenaga yang terlibat dalam penanganan medis Covid-19. Lalu, di tahap selanjutnya, akan diberikan kepada lebih dari 9 ribu TNI dan polisi, kemudian baru tahap ketiga diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN).



TERCAPIT IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER

Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tamparan keras bagi Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini harus bekerja keras meyakinkan publik bahwa partainya masih bersih dari korupsi.

Selasa (24/11) menjadi hari yang *naas* bagi Menteri KKP Edhy Prabowo. Kepulangannya ke Tanah Air usai melakukan kunjungannya di Hawaii, Amerika Serikat (AS) langsung disambut dengan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 23.40 WIB. Penangkapan Edhy ini berkaitan dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Tidak sendirian, Edhy Prabowo ditangkap bersama istrinya, Iis Rosita Dewi, yang juga anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Komisi V mengurus infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, cuaca, serta pencarian dan pertolongan. Selain itu, sejumlah orang ditangkap dalam OTT ini. Namun diketahui ada sejumlah orang lainnya yang dilepaskan KPK karena tidak berkaitan langsung.

Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers, Rabu (25/11) ada 17 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian OTT yang juga berlangsung di Jakarta, Depok, dan Bekasi tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo, staf khusus

Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Edhy, Safri, Siswadi, Ainul dan Suharjito langsung ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Andreau dan Amiril tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Diduga terima Rp 3,4 Milyar

Kasus ini bermula pada Mei 2014 ketika Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Dalam surat itu, Edhy menunjuk dua staf khususnya, Andreau Pribadi Misata dan Safri sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito menemui Safri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero

Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM (Amiril Mukminin) dengan APS (Andreau) dan SWD (Siswadi, pengurus PT ACK).

Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, PTT PP mengirim uang sejumlah Rp731.573.564 ke rekening PT ACK. Hal itu pun membuahkan hasil, atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas, PT DPP memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan *nominee* dari pihak Edhy.

“Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 Miliar,” ujar Nawawi.

Selanjutnya, pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer uang dari rekening Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih, staf istri Edhy, sebesar Rp 3,4 miliar. Uang tersebut diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istri Edhy yang bernama Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau.

Edhy, Safri, Siswadi, Ainul, Andreau, dan Amiril selaku tersangka penerima suap disangka melanggar melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal

**SAYA MINTA MAAF
KEPADA BAPAK
PRESIDEN, SAYA
SUDAH MENGKHIANATI
KEPERCAYAAN BELIAU
KEPADA SAYA. SAYA
JUGA MEMINTA MAAF
KEPADA PAK PRABOWO
SUBIANTO, GURU
SAYA, MENTOR YANG
SUDAH MENGAJARKAN
BANYAK HAL,**

- Edhy Prabowo

11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, Suharjito selaku tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edhy pun menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dia pun meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partia Gerindra Prabowo Subianto.

“Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden, saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Saya juga meminta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal,” ujarnya.

Edhy mengatakan apa yang dialami olehnya merupakan kecelakaan dan dirinya berjanji





Penangkapan Edhy Prabowo waktu di Bandara Soekarno Hatta.

akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab atas ini semua, saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan,” ujarnya.

Prabowo Harus Bertanggungjawab

Kasus yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo merupakan tamparan keras bagi Partai Gerindra. Pasalnya pada masa kampanye Pilpres 2019,

Prabowo Subianto yang pada saat itu maju sebagai Calon Presiden mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut pada acara *The World in 2019 Gala Dinner* yang diselenggarakan majalah *The Economist* di Hotel Grand Hyatt Singapura.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, Menteri hingga, Hakim tertangkap Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai kasus korupsi yang menjerat Edhy Prabowo ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas Gerindra dan juga Ketua Umumnya, Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan adanya kejadian ini maka cita-cita Prabowo Subianto sebagai Presiden akan tamat.

Penangkapan Edhy Prabowo menjadi “tamparan keras” bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingat Edhy Prabowo sangat dekat dengannya. “Ini pelajaran besar sekaligus tabakan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan KPK,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/11).

Lebih lanjut dia mengatakan sejak awal seharusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

“Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa,” ujar Arief.

Maka itu, menurutnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai.

Amir Fiqi

MENGUNGKAP DUGAAN SUAP IZIN EKSPOR BENUR



Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (25/11 2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Ia diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

● Andreau Pribadi Misata (APM)

Staf Khusus Menteri KKP/Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster

● Safari (SAF)

Staf Khusus Menteri KKP/Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster

● Ainul Faqih (AF)

Staf istri Edhy Prabowo

● Siswadi (SWD)

Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK)

● Amiril Mukminin (AM)

Pengurus PT ACK

● Suharjito (SJT)

Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) selaku tersangka pemberi suap



DUGAAN KASUS

EP pada Mei 2020 diduga menerima uang 100 ribu dolar AS (Rp1,4 miliar) dari SJT dengan tujuan agar PT DPP ditunjuk sebagai eksportir benih lobster.

SJT dan SAF sepakat para eksportir lobster hanya bisa menggunakan rasa pengiriman PT ACK.

PT ACK diduga menjadi perusahaan yang menampung dana dari para eksportir dengan total Rp9,8 miliar.

Pada 5 November ada aliran dana dari PT ACK ke rekening AF senilai Rp3,4



KRONOLOGI

21 - 23 November

KPK menerima informasi transaksi di rekening bank yang diduga sebagai penampung dana bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia.

24 November

KPK bersiap di area Bandara Soekarno Hata, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

25 November

- KPK mengamankan 17 orang dan membawanya ke Gedung I KPK untuk pemeriksaan.
- EP ditetapkan sebagai tersangka.

26 November

Dua tersangka APM dan AM menyerahkan diri ke KPK.



Ini adalah kecelakaan. Saya akan tanggung jawab dan ungkapkan yang saya lakukan.

Edhy Prabowo

EDHY PRABOWO (EP)





ATUR MONOPOLI, EDHY BERAKHIR DI BUI

Akibat mengatur monopoli alur ekspor benih lobster, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo "tercapit" KPK. Diduga mendapat uang suap Rp3,4 milyar. Jalan-jalan di Hawaii dan belanja sejumlah barang super mewah. Pulang ke Indonesia berakhir di penjara.

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11) di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari kunjungan kerja ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS), mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya para komunitas nelayan dan pengusaha ekspor benur dan lobster.

Pembina Komunitas Nelayan Bibit

Benur dan Lobster Jabar dan Sulsel, Irjen. Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan mengatakan, atas nama komunitas kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK yang sudah berhasil membongkar monopoli ekspor benur lobster yang memang dirasakan sangat mencekik para nelayan dan membingungkan para eksportir saat ini.

Dia melihat ada monopoli pasar dalam kasus ini, yaitu kolusi antara

PT ACK (Aero Citra Cargo) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengatur regulasi monopoli bahwa eksportir dari Indonesia harus dikirim melalui 6 PT (Perseroan Terbatas) yang ditunjuk asosiasi (pelobi), dengan harga beli lebih rendah sehingga sangat merugikan para nelayan.

"Hal ini sudah merupakan indikasi adanya praktek suap. Padahal *buyer* kita bisa menjual dengan laba profit Rp5 - Rp10 ribu untuk benur jenis mutiara, 1 - 2 ribu untuk benur jenis pasir," kata Anton, Kamis (26/11).

Begitu juga di sisi kargo, jasa ongkos pengiriman telah dikondisikan

dengan harga per ekor Rp1.800. Hal ini sangat memberatkan para eksportir. Padahal jasa kargo biasanya dihitung perkilogram. Bisa dihitung, berapa besar keuntungan dari pengiriman kargo saja.

Kalau menjualnya di luar 6 PT yang di tunjuk, pelobi kargo sengaja tidak akan memberangkatkannya. Di sini makin terlihat monopolinya, sementara 6 PT yang ditunjuk tersebut belum teruji masalah pembayaran dan teknis sortirannya. Bahkan di Vietnam ke 6 perusahaan itu sebenarnya sudah di *backlist*.

Anton berharap, KPK kali ini tidak setengah-setengah. Menurutnya, menteri bisa saja ditangkap tapi jika jaringannya tetap dibiarkan sama saja dengan bohong, Usut sampai tuntas semua oknum dan jaringan yang terlibat sampai ke akar-akarnya.

Semua pihak berharap ada titik terang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai bidang, tanpa kecuali perikanan dan kelautan, yang juga harus mendapatkan perhatian. Pasalnya perbuatan yang dilakukan oleh Menteri KKP tersebut sangat merugikan rakyat.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, Edhy bersama 16 orang lainnya diamankan karena kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Sebelumnya, Nawawi menerima informasi adanya dugaan terjadinya transaksi di rekening bank yang diduga sebagai penampung dana bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar negeri.

“Pada 21-23 November 2020, KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang



diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian pada Selasa (24/11), ia menjelaskan tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi tersebut.

Di Bandara Soekarno-Hatta, KPK menangkap delapan orang, yakni Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, Safri, Zaini, Yudha, Yeni, Desri, dan Selamat. Sedangkan di rumah masing-masing, KPK menangkap sembilan orang. Yaitu, Suharjito, Siswadi, Dipo, Deden Deni, Nety, Chusni Mubarok, Ainul Faqih, Syaihu Anam, dan Mulyanto.

Setelah menangkap 17 orang tersebut, pada 25 November KPK membawanya ke Gedung I untuk dilakukan pemeriksaan. “Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Nawawi.

Selain itu, nama lain yang terlibat

kongkalikong dalam kasus ini yaitu pengendali PT ACK Deden Deni (DD), Nety (NT) istri dari Siswadi, staf Menteri Kelautan dan Perikanan Chusni Mubarok (CM), Ainul Faqih (AF) staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, staf Menteri Kelautan dan Perikanan Syaihu Anam (SA), dan staf PT Gardatama Security Mulyanto (MY).

Setelah dilakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Selanjutnya, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yakni Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM), mereka semua sebagai penerima. Sedangkan sebagai pemberi adalah Direktur PT DPP Suharjito (SJT). **Amir Rifai**

Adagium satir yang menjadi judul dalam artikel ini begitu populer belakangan ini pasca ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (25/11) dini hari. Pasalnya, uang hasil suap atas izin ekspor benih lobster –biasa disebut benur- senilai Rp3,4 milyar sebagiannya dibelanjakan untuk membeli barang-barang super mewah.

Bersama sang istri, Iis Rosyati Dewi, Edhy bak pasangan *tajir mlinter* berbelanja sejumlah barang bermerek, seperti halnya koper dan dompet mewah Louis Vuitton (LV) seharga Rp52,7 juta, Sepatu LV Abesses Derby (14,8 juta), tas Chanel (Rp53 juta), jam tangan Rolex (Rp150 juta), dan Jacob n Co (diprediksi Rp50 juta-Rp5 milyar), tas koper Tumi (Rp10 juta), serta sepeda Specialized Works/ S-Work (Rp150 juta), tas kulit Hermes, baju Old Navy.

Hanya tiga hari *ngemal*, tepat 21-23/11, pasangan sejoli ini diprediksi menghabiskan total belanjaan senilai Rp750 juta. Total rupiah tersebut senilai dengan harga satu properti rumah mewah, dengan tipe 75 dan luas lahan di atas 90 meter persegi di kota-kota besar seperti di Surabaya, Malang, atau bahkan di Jakarta. Ironis.

Tak pelak, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Edhy dan istrinya langsung dijemput KPK, dan dijadikan tersangka atas suap izin ekspor benih lobster. Dia langsung dipakaikan baju tahanan KPK, dan dipamerkan di depan khalayak media bersama dengan barang-barang yang dibelinya di Hawaii.

Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Edhy mengakui dirinya dan isterinya telah menggunakan uang suap hingga Rp3,4 miliar untuk berbe-



SAYA BELANJA, MAKA SAYA ADA

Louis Vuitton, Hermes, Old Navy, Rolex, dan Jacob n Co adalah tanda yang menggambarkan identitas penggunanya. Merek sejumlah produk ini adalah simbol kemewahan, glamor, dan pangkat. Siapa yang sanggup berbelanja atas barang-barang bemerek super mahal ini, sebenarnya ingin pengakuan atas posisinya dalam kelas sosial tertentu. Kalangan selebritas dan pejabat negara banyak yang menggunakannya. Namun, akan berbeda cerita bila konsumsi atas produk-produk barang mewah tersebut dari hasil uang korupsi atau suap pejabat pemerintahan.

lanja barang-barang mewah di Honolulu, AS. Keduanya berbelanja selama dua hari di Honolulu. Padahal, agenda utamanya haruslah menjalin komunikasi internasional di bidang yang diamanahkannya oleh Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Edhy melakukan kunjungan kerja ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS) sejak 20 November. Kunjungannya tersebut mulanya bertujuan untuk melakukan lobi internasional di bidang perikanan dan kelautan. KKP menggandeng Oceanic Institute of Hawaii Pacific University, salah satu lembaga riset yang berbasis di Honolulu. Setelah menyelesaikan agenda penandatanganan Letter of Intent (LoI), dia dan rombongannya ber-

temu 201 Anak Buah Kapal nelayan yang merupakan warga Negara Indonesia yang berada di sana.

Namun, dua hari terakhir kunjungannya itu, dia bersama istrinya menggunakan waktunya untuk jalan-jalan dan membeli barang-barang berkelas. Saat ini, Nawawi melanjutkan, sejumlah barang mewah hasil belanjaan pasangan suami-istri yang masing-masing adalah pejabat pemerintahan itu telah disita KPK sebagai barang bukti.

“Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas dengan merek LV (Louis Vuitton), tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi dan Tas

POTRET MEWAH ISTERI EDHY

Koper LV, serta sepeda,” ujar Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (26/11).

Menurut dosen Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Siti Zunariyah, seperti dikutip dari *Kompas.com* (27/11), perilaku konsumtif Edhy Prabowo dan istri dalam membeli barang-barang mewah adalah salah satu bentuk dari masyarakat post-modern atau menjadi bagian dari konsekuensi terhadap modernisasi.

Artinya, dia melanjutkan, masyarakat post-modern akan memiliki eksistensi jika mampu mengonsumsi barang-barang mewah dengan merek tertentu, akan mendapatkan pengakuan dari kelompoknya dan masyarakat lain terhadap status yang sedang melekat padanya.

Siti mengungkapkan, bagi orang-orang tersebut, nilai tanda dan nilai tukar akan mampu memperkuat dan memperkokoh status dan kedudukan mereka dalam masyarakat.

Terungkapnya sejumlah barang mewah yang bersamaan dengan operasi tangkap tangan atas pejabat tertentu bukanlah kali pertama ini terjadi. Ada banyak barang mewah yang sebelumnya telah disita KPK sebagai barang bukti atas tindak korupsi atau suap atas nama pejabat pemerintah.

Di antara sejumlah barang mewah itu seperti mobil Sport, perhiasan, tas mewah, uang tunai hingga aset properti. Bahkan, sitaan barang koruptor yang pernah “mampir” di kantor KPK, juga ada yang berupa satu set meja makan, puluhan motor, dan bus. Belum lagi sejumlah rumah, tanah dan bangunan lain.

Penyitaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah

Potret kehidupan mewah istri Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi menjadi sorotankarena kerap menampilkan hidup mewah pada setiap postingannya. Ini dapat terlihat di Instagram pribadinya @iisedhyprabowo. Politisi Gerindra ini bahkan sempat memamerkan tas tangan Chanel berwarna putih yang turut disita KPK yang berharga kira-kira Rp53 juta. Iis adalah anggota DPR, dan menduduki Komisi V DPR membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Barang-Barang Mewah

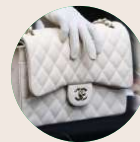
- **Tas Hermes**

Hermes merupakan brand mewah yang selalu diincar pecinta fashion, tak ketinggalan menjadi salah satu Barang Bukti yang disita KPK meski tidak ditunjukkan langsung, namun seri tas Hermes mempunyai harga fantastis puluhan hingga ratusan juta rupiah.



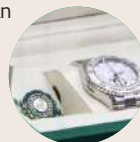
- **Tas Tangan Chanel**

Pada unggahan Instagram istri Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, tas serupa pernah terlihat dipakainya. Tas Chanel berwarna putih seharga 3.370 dollar AS atau sekitar Rp.53 juta itu dipakainya saat berada di Melbourne, Australia, Maret 2020



- **Jam Tangan Rolex**

Jam tangan mewah asal Swiss ini diproduksi menggunakan material emas, perak dan kristal. Jam tangan ini memiliki harga fantastis, ditaksir seharga Rp. 150 juta.



- **Jacob&Co**

Salah satu Barang Bukti yang diperlihatkan KPK



adalah Jam tangan bermerk Jacob&Co. Jacob&Co. dikenal sebagai merk perhiasan dan jam tangan mewah. Jam tangan ini mempunyai harga dari yang termurah sekitar Rp. 50 juta hingga Rp. 5 Milyar.

- **Sepeda Road Bike Merk Specialized S-Work**

Sepeda yang belum sempat dirakit ini merupakan produksi series teranyar dari Specialized yang merupakan brand sepeda asal Amerika



Serikat. Harga sepeda ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

- **Sepatu Louis Vuitton Abesses Derby**

Sneakers berwarna hitam untuk pria tersebut dinamakan Abesses Derby pada situs resmi Louis Vuitton. Dan



harga sneakers dengan detail logo LV berwarna emas itu mencapai US\$ 1.050 atau sekitar Rp 14,8 juta.

- **Koper Tumi**

Tak luput dari sitaan KPK, Koper Tumi menjadi favorit pecinta fashion karena ringan dan kokoh. Koper ini dibanderol sekitar Rp. 10 juta



penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Pasca pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

yang baru yaitu UU No. 8 Tahun 2010,) KPK mendapat legitimasi menangani TPPU (*predicate crime*: korupsi) sehingga kegiatan *asset tracing* diarahkan untuk mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil Tindak Pidana Korupsi (TPK). **Nafik/Ika**



CAHAYA DI TENGAH GULITA WABAH CORONA

Pfizer dan Moderna adalah dua perusahaan farmasi asal Amerika Serikat (AS) yang sedang dibicarakan masyarakat global. Pasalnya, belum lama ini, keduanya mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkannya sukses melewati uji klinis dengan efektifitas di atas 90 persen. Efektifitas Pfizer mencapai 90 persen, sedangkan Moderna efektif 95 persen.



Penemuan vaksin Covid-19 yang cukup cepat tersebut –hanya setahun dibanding sejumlah vaksin atas virus lain yang umumnya dua atau tiga tahun bahkan vaksin virus HIV hingga sekarang belum ditemukan- menjadi harapan besar bagi masyarakat dunia. Pasalnya, kemunculan wabah ini meluluhlantakkan hampir seluruh sektor kehidupan.

Penting diketahui, tak hanya Pfizer dan Moderna yang mengklaim pengembangan vaksinnya mencapai efektifitas 90 persen. Kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Institut Riset Epidemiologi dan Mikrobiologi Gamaleya yang didaftarkan di Rusia belum lama

ini, yaitu Sputnik V, juga mencapai efektifitas sebesar 92 persen.

Begitupun dengan tiga perusahaan farmasi asal China yang juga telah lebih dulu mengembangkan vaksin Covid-19, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Efektifitas ketiganya mencapai 90 persen. Ketiga vaksin yang diproduksi negeri Tirai Bambu tersebut sudah dipesan pemerintah Indonesia, dan November lalu tengah menjalani uji klinis tahap ketiga.

Dalam beberapa bulan ke depan, sangat mungkin akan banyak produksi perusahaan farmasi dari berbagai negara maju lainnya. Negara-negara maju dengan pihak swastanya akan turut berlomba mengembangkan vaksin Covid-19 dengan efektifitas yang jauh lebih baik dan efisien.

Dalam hal efisiensi, Pfizer dianggap masih memiliki kelemahan dari sisi distribusi. Sebab, vaksin yang tengah dikembangkannya bersama *BionTech*, hanya bisa bertahan dalam suhu yang sangat dingin yaitu -75 derajat celsius.

Sebab, sebagaimana tantangan yang dihadapi Pfizer. Meski efektifitasnya mencapai di atas 90 persen, namun ia terkendala dalam hal distribusi ke berbagai daerah. Daya tahannya pun hanya lima hari. Kondisi demikian akan menyulitkan bagi proses distribusi ke daerah-daerah yang akses transportasinya belum baik.

Profesor di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Flinders, Australia, Nikolai Petrovsky berpendapat vaksin Pfizer yang berbasis mRNA memiliki beberapa kelemahan: *Pertama*, vaksin Pfizer membutuhkan penanganan khusus karena harus disimpan di kulkas yang berdaya dingin di bawah -80 derajat celsius.

“Padahal umumnya lemari es, hanya berdaya dingin -4 hingga -5 derajat celsius. Jika begini akan sulit

dalam pendistribusian logistic vaksin,” kata Petrovsky.

Kedua, karena vaksin ini hanya berisi fragmen virus atau potongan bagian virus, ada kemungkinan vaksin ini memberikan respons imun yang lemah. Sehingga butuh tambahan dorongan lain untuk menambah kemampuan; *Ketiga*, ada kemungkinan teoritis kalau vaksin DNA/RNA bisa menyatu ke dalam genom penerima; *Keempat*, vaksin ini menggunakan teknologi pengembangan baru yang belum banyak diuji. Pengujian hingga saat ini masih dalam uji klinis. Vaksin jenis ini juga belum pernah digunakan pada vaksin lain sebelumnya.

Berbeda, misalnya, dengan vaksin yang dikembangkan Moderna. Vaksin yang tengah dikembangkannya diklaim bisa bertahan pada suhu dingin lemari es pada umumnya dan berdaya tahan mencapai 30 hari.

“Kabar dari Moderna ini luar biasa menggembirakan dan mendorong optimisme bahwa kita memiliki pilihan sejumlah vaksin yang bagus dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Profesor Peter Openshaw dari Imperial College London.

Selain punya efektivitas yang mencapai 94,5 persen, vaksin Covid-19 Moderna juga mirip dengan vaksin Pfizer dalam hal teknologi yang digunakan. Keduanya menggunakan platform mRNA, yakni menggunakan kode genetik virus yang bisa dibuat manusia.

Cara kerja vaksin ini adalah dengan melatih sistem imun tubuh untuk memerangi infeksi virus. Teknologi yang menggunakan platform mRNA ini terbilang paling mutakhir, belum pernah digunakan dalam vaksin yang saat ini beredar.

Sejumlah perusahaan farmasi dari negara-negara maju yang terus

mengembangkan vaksin Covid-19 tersebut patut diapresiasi. Bagaimana tidak, selama kurang lebih satu tahun sejak China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019, virus ini telah menginfeksi hampir 56 juta jiwa dan merenggut nyawa lebih dari 1,3 juta jiwa secara global (*worldometers.info*, 18/11).

Dipastikan, jumlah kasus positif dan korban meninggal dunia tersebut akan terus bertambah seiring pengembangan vaksin yang belum tuntas masa uji klinisnya. Namun, publik masih bisa menaruh harapan, bahwa dengan ditemukannya ragam vaksin yang semakin menunjukkan kelebihan-kelebihannya ini, angka kasus sembuh atas infeksi Covid-19 ini bisa terus meningkat dengan cepat.

Dari semua jenis vaksin yang tengah dikembangkan sejumlah negara maju, saat ini vaksin produksi Sinovac sedang diuji kliniskan di Indonesia. PT Bio Farma menunjuk Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung menjadi tim uji klinis di Indonesia. Uji klinis ini telah dimulai sejak Juli lalu, dengan menargetkan sekitar 1.620 relawan yang akan mendapatkan suntikan vaksin Sinovac.

“Apabila uji klinis vaksin Covid-19 tahap 3 lancar, Bio Farma akan memproduksinya pada Q1 2021. Kami sudah mempersiapkan fasilitas produksinya di Bio Farma, dengan kapasitas produksi maksimal 250 juta dosis,” ujar Honesti dalam rilis yang diterima awak media, pekan terakhir Juli lalu.

Sebab itu, jika tidak ada kendala berarti, tahun depan akan menjadi penentu bagi keberhasilan dunia dan khususnya Indonesia, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Covid-19. Vaksin-vaksin ini akan mulai diberikan kepada masyarakat mulai Januari 2021 secara bertahap.

Hal tersebut sebagaimana prediksi yang diungkapkan Presiden Jokowi pada pekan kedua Agustus 2020. Menurutnya, pemberian vaksin Sinovac baru akan diberikan kepada masyarakat pada Januari. Vaksinasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan profesinya, yang tentunya pertama-tama akan diberi adalah para tenaga kesehatan (nakes), baik dokter, perawat, maupun semua yang terlibat dalam penanganan kesehatan. Mereka adalah garda terdepan dari penanggulangan Covid-19.

Tahap kedua, vaksinasi akan diberikan kepada personel TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diprediksi jumlah TNI yang akan divaksin pada tahap ini mencapai sekitar 9 ribu personil.



**APABILA UJI KLINIS
VAKSIN COVID-19
TAHAP 3 LANCAR,
BIO FARMA AKAN
MEMPRODUKSINYA
PADA Q1 2021.
KAMI SUDAH
MEMPERSIAPKAN
FASILITAS PRODUKSINYA
DI BIO FARMA, DENGAN
KAPASITAS PRODUKSI
MAKSIMAL 250 JUTA
DOSIS,”**

- Honesti



Prediksi pemerintah Indonesia untuk memberikan vaksin kepada masyarakat pada tahun depan sesuai dengan pengamatan sejumlah epidemiologi dari berbagai dunia. Salah satunya berasal dari salah satu Profesor Kedokteran Regius di Universitas Oxford, John Bell. Dia mengatakan, vaksin yang dibuat oleh Pfizer memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Jadi, jika tak ada halangan, produksi vaksin yang dikerjasamakan dengan *BionTech* ini akan bisa dipasarkan secara global pada 2021.



Presiden Jokowi berkunjung ke PT Bio Farma, sebagai perusahaan kimia yang akan memproduksi vaksin Sinovac di Indonesia.

Karena 2021 menjadi tahun penentuan bagi implementasi vaksin Covid-19 di tengah masyarakat, maka dipastikan kebutuhan akan vaksin ini pastilah sangat tinggi. Banyak negara yang akan saling berebut untuk membelinya. Sebab itu, jika tidak cepat-cepat memesan, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai

lebih dari 268 juta jiwa ini, tidak akan kebagian.

“Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, dan proses produksi yang bertahap, dan berebut dengan negara lain, diperkirakan butuh waktu satu tahun untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) sekaligus ahli epidemiologi Tri Yunis Miko Wahyono, dikutip dari *Sindonews*, Senin (12/10).

Keberadaan vaksin Covid-19 yang

beragam tersebut menjadi harapan baru bagi dunia. Masyarakat global kembali menatap masa depan yang lebih baik, dengan tidak lagi khawatir dihantui wabah ini. Namun, satu pelajaran penting yang patut menjadi kebiasaan baru pasca pandemi ini nanti berakhir, yaitu masyarakat perlu membiasakan diri untuk hidup sehat. Mulai dari perilaku yang sederhana, tapi sangat berdampak bagi kesehatan pribadi dan lingkungan, yaitu mencuci tangan dan memakai masker.

Nafik M



MENANTI KABAR BAIK UJI KLINIS SINOVAC

Di awal pemberitaan media mengenai rencana pemerintah Indonesia yang akan melakukan pembelian vaksin asal China, kontroversi menyeruak di berbagai perbincangan media sosial. Tetapi, lambat laun, setelah Indonesia benar-benar membelinya, dan melakukan uji klinis hingga tahap ketiga November ini, nyatanya seluruh proses berjalan lancar. Kini, tak banyak lagi ditemukan, narasi-narasi hoax mengenai hal ini.

Hingga artikel ini ditulis pada Rabu (19/11), vaksinasi Sinovac terhadap lebih dari 1.600 relawan terpantau aman atau tidak menimbulkan efek samping berlebihan. Dari tahap pertama hingga ketiga November ini, seluruh proses uji klinis berjalan lancar dan tak ditemukan efek samping yang serius.

Tidak mengherankan bila pada beberapa kesempatan terakhir, Presiden Jokowi bersikap optimis bila pemberian vaksin Sinovac kepada masyarakat akan bisa dilakukan pada akhir Januari 2021. Tentu saja dengan catatan jika tidak ada persoalan serius dari proses uji klinis tersebut.

Sejak Agustus lalu, pelaksanaan uji klinis ini dikerjakan oleh PT Bio Farma dengan menunjuk Tim Uji Klinis dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Presiden Jokowi memang telah memiliki perhatian terhadap Sinovac sejak awal, tepatnya ketika pabrikan farmasi asal China ini mulai mengembangkan vaksin Covid-19. Dia menginstruksikan menteri yang terkait, agar mengamankan *seat* untuk pemesanan vaksin di tiga perusahaan China yakni Cansion, Sinopharm/ G42, dan Sinovac.

Kemudian, ketika ketiga vaksin tersebut telah melewati uji klinis tahap III di sejumlah negara, akhirnya pemerintah Indonesia menandatangani pilihan pada vaksin CoronaVac buatan Sinovac Biotech.

CEO SinoVac Yin Weidong mengatakan, secara pribadi telah diberi vaksin eksperimental. Dia mengaku, pembuatan vaksin corona awalnya hanya ditujukan untuk Wuhan dan China, tetapi kini vaksin Covid-19 sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia. “Tujuan kami adalah memberikan vaksin kepada dunia termasuk



AS, UE, dan lainnya,” kata Yin seperti dikutip dari *Euronews*, belum lama ini.

Sinovac Menjadi Pilihan

Pada akhirnya, pemerintah menandatangani pilihan pada Sinovac. Selain karena telah lulus dalam uji klinis tahap I dan II di sejumlah negara, juga karena salah satu perusahaan yang penelitian vaksin untuk Covid-19 sudah masuk dalam daftar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Lebih dari itu juga, Sinovac BioTech dan PT Bio Farma telah lama melakukan kerjasama di bidang pengembangan vaksin. Hal ini sebagaimana diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kedepuitan II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti. Dia menilai, vaksin Sinovac akan lebih baik bila digunakan di Indonesia. Indonesia terlibat langsung dalam pengujian tahap III melalui PT Bio Farma yang memiliki kredibilitas Internasional dalam hal pengujian vaksin.

“Selain itu, antara Sinovac Biotech dan PT Bio Farma telah sering melakukan kerjasama,” kata Brian Sri.

Tim Uji Klinis Vaksin Unpad Kusnandi Rusmil mengatakan, uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan, dipastikan tak ada masalah dan semua relawan disebut dalam keadaan baik-baik saja.

“Selama ini, tak ada kejadian mengkhawatirkan. Panas ringan, bengkak 2 hari ringan. Yang panas 2 persen. Di Indonesia tak ada masalah. Semua relawan, semuanya *happy-happy* saja,” katanya.

Hasil uji klinis juga memberi peningkatan kekebalan tubuh para relawan meningkat 92 persen dalam waktu dua minggu. Diprediksi peningkatan antibodi akan bertambah menjadi 97 persen pada empat minggu kemudian.

Tak Ada Laporan Efek Samping

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa uji klinis vaksin CoronaVac buatan



Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Sareal, Bogor dan menjelaskan tentang tahap pertama yang berhak diberikan vaksin Covid-19 di awal Januari 2021.

Sinovac di Bandung tak ada laporan efek samping yang serius.

“Per 6 November sudah selesai 1.620 subjek, dosis pertama dan vaksin kedua 1.603 subjek, dan masuk 1.520 untuk masuk periode monitoring. Sekarang masih berlangsung dalam rangka pengawalan terkait aspek pengawalan dan keamanan,” ujar Kepala BPOM RI Peni Kusumastuti Lukito saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (17/11).

BPOM memeriksa secara langsung fasilitas produksi Sinovac. Institusi ini mendapatkan data yang tidak diragukan mengenai keberadaan vaksin tersebut. Dalam hal mutu, tidak ada masalah dan tinggal menunggu khasiat dan keamanannya. Monitoring akan terus dilakukan hingga uji klinis tahap akhir selesai.

“Sekarang menunggu keamanan dan khasiat dari hasil analisa, serta *monitoring* atau observasi 3 bulan dan

6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua,” tegas Peni.

Adapun hasil dari observasi ini, nantinya yang akan digunakan oleh BPOM untuk bisa mengeluarkan Emergency Used Authorization (EUA). EUA adalah bentuk persetujuan berbasis data, diberikan berdasarkan kondisi bahaya (*emergency*). BPOM sudah mengeluarkan payung hukumnya untuk EUA.

Setelah melihat perkembangan kondisi di lapangan, Presiden Jokowi memperkirakan vaksinasi virus Covid-19 akan bisa mulai dilakukan pada awal 2021.

“Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi di akhir tahun atau di awal tahun, akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021,” kata Jokowi setelah berkunjung ke Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, seperti disiarkan di akun *YouTube* Sekretariat Presiden, Rabu (18/11).

Namun, BPOM menyatakan rencana pemberian EUA terpaksa mundur dari rencana awal minggu ketiga Desember 2020, menjadi minggu ketiga Januari 2021. Hal ini dikarenakan kelengkapan data yang masing dianggap kurang di akhir Desember. Data tersebut meliputi seluruh pelaporan uji klinik vaksin Covid-19 fase 1 dan 2 Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin Covid-19 sampai 50 persen. Namun secara keseluruhan, Berdasarkan hasil inspeksi BPOM ke Beijing, mutu vaksin Sinovac dipastikan baik.

Seusai kunjungannya ke Puskesmas Tanah Sareal, Bogor lalu, Jokowi menjabarkan siapa saja yang menjadi prioritas vaksinasi Corona. Jokowi menegaskan para dokter hingga tenaga medis akan menjadi prioritas vaksinasi COVID-19.

Menurut Presiden Jokowi, kelompok prioritas yang akan divaksin adalah

para tenaga kesehatan, setelah itu enaga medis, dan baru akan diikuti dengan kelompok TNI-Polri serta aparat sipil negara (ASN).

Polemik Vaksin Berhenti

Ribuan warga China telah disuntik vaksin Covid-19 sebagai program *kebijakan* otorisasi kebijakan darurat (*emergency use authorization*). Kepala Ahli Biosafety di Pusat Pengendalian dan Penyakit (CDC) China di Beijing Wu Guizhen mengatakan, program penggunaan vaksin secara darurat akan dimulai dalam skala kecil, dan telah berkembang secara bertahap sejak Juli. Penggunaan tersebut dalam pantauan secara hati-hati.

Wu juga mengungkapkan, dirinya sudah disuntik pada April lalu. Bahkan tidak ada efek samping yang terjadi dari penggunaan vaksin darurat tersebut.

Dalam hal ini, China National Biotech Group (CNBG) unit Sinopharm telah mengembangkan dua vaksin untuk penggunaan darurat. Begitupun dengan Sinovac, yang sudah mengkonfirmasi penggunaan vaksin daruratnya sebanyak puluhan ribu orang yang telah diinokulasi. CNBG juga mengatakan, sudah memberikan ratusan ribu dosis vaksinnya, di mana salah satu vaksinnya mengharuskan seseorang menerima 2-3 suntikan untuk diinokulasi.

“Sejauh ini, di antara orang-orang yang divaksinasi, tidak ada yang terjangkit penyakit itu. (Skema vaksinasi) bekerja dengan sangat baik, tidak ada efek samping yang terjadi,” jelas Wu yang dikutip dari Reuters, Jumat (18/9).

Namun suntik vaksin yang eksperimental tersebut dikritik oleh berbagai negara. Salah satu yang mengkritiknya adalah ilmuwan dari New York University Arthur Caplan. Dia berpendapat, langkah tersebut sangat berbahaya dan sembrono, pasalnya

vaksin ini masih diuji secara minimal dan belum di publikasikan.

Pendapat tersebut dikuatkan ahli Epidemiologi dari RAND Corporation Jennifer Huang Bouey. Dia menilai praktik terburu-buru ini dapat menjadi bumerang sebab bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada vaksin sehingga semakin sedikit orang yang mau divaksinasi.

Menurut American Council on Science and Health, sebuah organisasi penelitian dan pendidikan, tingkat keberhasilan uji klinis vaksin penyakit menular hanya 33,4%. Artinya sebagian besar vaksin yang masuk ke tahap uji klinis akan gagal.

Ditambahkan, seorang peneliti vaksin di John Hopkins University Anna Durbin. Dia menyebutkan, program penggunaan darurat Vaksin China ini bisa sangat berisiko. Ia mengatakan tidak mungkin bisa menilai kemanjuran vaksin tanpa kelompok standar uji klinis.

Tak pelak, berbagai pendapat epidemiolog dari berbagai negara di luar China tersebut, memengaruhi diplomasi vaksin sejumlah negara. Misalnya saja Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang menolak sejumlah vaksin yang berasal dari negeri Tiongkok tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Eduardo Pazuela dalam pertemuan dengan Gubernur Sao Paulo Joao Doria mengumumkan pembelian vaksin Corona dari China senilai USD360 juta atau setara dengan Rp5,2 miliar.

Penolakan juga datang dari masyarakat Indonesia dengan beredarnya petisi di *change.org* yang menolak penggunaan vaksin tersebut karena semuanya belum lolos uji tahap III. Seorang dokter dari peneliti kedokteran Yohanes Cakrapradipta Wibowo, memulai petisi ini dengan target 200 orang, dan sudah mendapat



tanda tangan melebihi target.

Yohanes mengungkapkan ada beberapa alasannya menyerukan penolakan vaksin ini, pertama seluruh vaksin dari China yang didatangkan belum lolos uji klinis fase 3. Akibatnya vaksin buatan Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics belum ada lembaga otoritas seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan penggunaan vaksin-vaksin tersebut.

Kedua, dalih EUA berpotensi masalah dan tidak boleh dijadikan legitimasi mutlak. Apalagi EUA yang dikeluarkan oleh negara lain tanpa ada analisis data dan pertimbangan yang matang.

Ketiga, vaksin “setengah jadi” ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika timbul efek yang tidak diinginkan. “Apalagi tenaga medis menjadi salah satu prioritas pemberian vaksin. Padahal sektor kesehatan sudah terpukul hebat saat pandemi ini,” tulisnya di *Change.org*

Meski mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, China mengklaim sejauh ini tidak ada reaksi merugikan yang jelas di antara orang-orang yang diinokulasi. Sinopharm sendiri, ba-

nyak dikritik oleh ilmuwan karena mengklaim vaksinasi Covid-19 yang meluas dibawah ketentuan penggunaan darurat menunjukkan bahwa kedua suntikannya aman dan efektif.

Bahkan, secara umum, situasi sosial dan kesehatan China saat ini membuktikan diri bahwa negara dengan peradaban besar ini bisa keluar dari jerat wabah tersebut. Hingga artikel ini ditulis (Jum’at, 20/11), total kasus positif di China hanya mencapai 86.398 orang, dengan kasus kematian sebanyak 4.683 orang. Bisa dibandingkan dengan di Indonesia yang total kasus positifnya mencapai 483.518 orang, dengan kasus kematian mencapai 15.600 orang.

Sebab itu, pemerintah Indonesia perlu belajar mengambil tindakan tegas dan terukur dari China. Meski ia menjadi negara pertama yang terpapar Covid-19, dengan kengerian yang semua masyarakat dunia saksikan waktu itu, namun sekarang ia justru bisa keluar dari jerat wabah ini dan kini memberi pengalamannya dan kemanfaatannya dengan menemukan tiga vaksin telah terbukti efektifitasnya.

Ika/Nafik

RAGAM VAKSIN, VARIASI HARGA?

Indonesia telah memesan sejumlah vaksin Covid-19. Cansino, G42/ Sinopharm, dan Sinovac. Ketiganya buatan China, dengan masing-masing metode pelemahan Covid-19. Sejak bulan lalu, ketiga vaksin ini sudah diberikan, terutama para “petarung di garis depan” yaitu para tenaga kesehatan (nakes). Tapi penting untuk diketahui, bahwa banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam merealisasikan pemesanan ketiga vaksin tersebut. Apalagi, setiap harga vaksin tersebut, berbeda harga satu sama lainnya.

PT Bio Farma Tbk terus berupaya menghadirkan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia. Perusahaan pelat merah itu menargetkan akhir tahun ini, vaksin sudah bisa diproduksi secara massal. Namun, hingga kini harganya belum juga ditetapkan dan masih dalam pembahasan.

Covid-19 masih menjadi momok

yang menakutkan bagi dunia. Bahkan WHO dan banyak negara maju terus mengupayakan bagaimana cara agar menemukan vaksin atau obat penangkalnya dengan cepat. Untuk merealisasikan hal tersebut, mereka berlomba agar jenis penyakit pernapasan yang telah menewaskan lebih dari 1.309.944 (per Sabtu, 14/11) secara global ini, bisa hilang atau

paling tidak meminimalisir jumlah korban yang terinfeksi. Saat ini, PT. Bio Farma telah menugaskan Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai pelaksana uji klinis vaksin Covid-19 di Indonesia.

Ada banyak produk vaksin yang kini mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, mulai Sinovac, Sinopharm, Cansino, hingga yang terbaru yang dianggap memiliki afektifitas kesembuhan 90% adalah Pfizer, perusahaan vaksin terbesar di dunia yang berbasis di New York. Vaksin ini menggunakan teknologi rekayasa genetika yang bertujuan melihat genom RNA virus. Vaksin ini teruji untuk usia 16-85 tahun. Uji klinis telah dilakukan dengan menyuntikkan vaksin pada 43.500 orang di enam negara dan diklaim tidak ada masalah serius pada fase akhir uji coba.

Sementara itu, Sinovac merupakan vaksin yang dikeluarkan dari Perusahaan bioteknologi asal China. Sinovac mengembangkan vaksin Covid-19 dengan metode inaktivasi. Inaktivasi adalah metode pembuatan vaksin dengan menggunakan versi tidak aktif dari jenis virus atau bakteri penyebab penyakit tertentu.

“Harga vaksin Sinovac mencapai Rp142 ribu hingga Rp283 ribu,” jelas Menteri Koordinator Bidang



Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro (kiri) bersama Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir (kanan) menunjukkan produk BioCov-19 saat kunjungan kerja di Gedung Bio Farma, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Rabu (29/7).



**“HARGA VAKSIN
SINOVAC
MENCAPAI RP142
RIBU HINGGA
RP283 RIBU,”**

- Airlangga Hartarto



Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam *Sarasehan Virtual 100 Ekonom*, yang ditayangkan *CNBC Indonesia*, Selasa (15/9).

Sama halnya dengan Shinopharm, yang juga produk vaksin asal China, yang juga memanfaatkan inaktivasi virus. “Kandidat vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus dengan harga sekitar Rp2.141.585,” *Direktur China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) Liu Jingzhen*.

Dia menambahkan, vaksin ini tidak akan dikenakan harga terlalu tinggi. Diperkirakan akan menghabiskan biaya beberapa ratus yuan untuk satu suntikan, dan untuk dua suntikan biayanya kurang dari 1.000 yuan atau Rp2.141.585.

Adapun Cansino merupakan vaksin yang juga di produksi oleh China. Ia

mengembangkan kandidat vaksin Covid-19 bernama Ad5-nCoV bersama tim yang dipimpin pakar penyakit menular dari militer China, Chen Wei. Untuk produk ini perusahaan pengembang belum memperinci harga detainya. Selain produk China, terdapat juga Astrazeneca, vaksin Covid-19 yang dikembangkan Sanofi bersama GlaxoSmithKline (GSK) Inggris.

Harga vaksin Covid-19 yang bervariasi tersebut menimbulkan sejumlah polemik di Indonesia, terlebih pemerintah kita telah memesan Sinovac. Politikus Partai Gerindra Fadli Zon bersuara melalui akun *Twitter*-nya @fadlizon. Dia membandingkan harga Sinovac di Indonesia dan di Polandia yang dipatok berbeda. Jika harga vaksin Sinovac di Polandia dipatok sebesar 2 Euro Eropa per dosis, setara Rp35 ribu, sementara di Indonesia dipatok lebih besar mencapai Rp200 ribu per dosis.

“Info menarik dari Menkes Polandia: vaksinasi bisa diterapkan sekitar Maret-April 2021. Harga vaksin di Eropa sekitar 2 Euro (sekitar Rp35.000). Ini kabar baiknya. Murah,” tulis Fadli Zon di akun pribadi *Twitter*-nya, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut dipertanyakan oleh Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, dengan menyoal sumber informasi tersebut. Menurut Honesti, pernyataan Fadli Zon mirip dengan perkataan sebelumnya jika harga vaksin Sinovac di Brasil yakni Rp14.161 per dosis. Di sisi lain, Honesti memastikan pihak Sinovac telah membantah informasi tersebut.

Honesti Basyir mengatakan harga vaksin corona sekitar Rp200 ribu. Pernyataan Honesti ini juga menanggapi berita tentang kesepakatan Sinovac dengan Brasil yang akan menjual vaksin sekitar 1,96 US\$ atau setara Rp29 ribu.

“Kisaran harganya Rp200 ribu. Informasi harga vaksin Covid-19 di Brasil telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak



Salah satu relawan diberikan calon vaksin Covid-19.

pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak USD90 juta dengan pemerintah Brasil tidak tepat. Mengenai harga USD1,96 per dosis pun tidak tepat,” kata Honesti dikutip dari laman resmi *CNN Indonesia*.

Menurut Honesti, harga vaksin Sinovac kepada setiap negara merupakan kesepakatan yang hanya diketahui dua pihak. Karenanya, ia

mengaku tidak mengetahui ketika ditanya mengenai rentang harga vaksin Sinovac di setiap negara.

Harga untuk setiap negara silahkan dicek ke negara yang bersangkutan, karena kebijakan satu negara akan berbeda dengan negara lain. Bisa saja murah karena pemerintah negara tersebut memberikan subsidi atau menggratiskan.

Untuk diketahui, Indonesia telah memesan vaksin Covid-19 dari beberapa negara, termasuk Sinovac dari China. Sinovac sendiri menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Perusahaan farmasi itu akan mengirim 1,5 juta dosis vaksin pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk *bulk*.

Ketua Konsorsium Penelitian dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti memperkirakan, apabila vaksin virus corona sudah tersedia, harganya akan berkisar Rp75.000 per orang.





Menteri BUMN RI sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir dalam kunjungannya ke PT Bio Farma, Selasa (4/8). Dia mengatakan, Bio Farma siap Produksi 250 juta Dosis Vaksin Covid-19.

“Jika harga vaksinnya sekitar USD 5 atau Rp75.000, maka kita butuh setidaknya Rp26,4 triliun,” ujarnya dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (02/07).

Terlepas dari berbagai macam harga Vaksin Covid-19 tersebut Presiden Joko Widodo mengharapkan agar harga vaksin Covid-19 terjangkau

bagi masyarakat Indonesia. “Biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat. Disiapkan aturan sejak awal, saya minta harganya bisa terjangkau,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, vaksinasi tersebut terbagi dua, ada yang gratis namun ada juga berbayar bagi yang mampu. Sehingga Jokowi menginginkan aturan tersebut disiapkan. “Selain itu juga masalah dengan karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri

atau bayar sendiri,” katanya.

Namun Presiden Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut berapa harga ideal untuk satu dosis vaksin virus Corona. Hal yang lebih penting kata Jokowi bahwa semua dikomunikasikan ke public secara gamblang.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020. **Amir Rifai/Nafik M**

RETNO LISTYARTI

KOMISIONER BIDANG PENDIDIKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

PEMBUKAAN SEKOLAH TERGANTUNG KESIAPAN SEKOLAH, BUKAN ZONA

Pandemi Covid-19 telah membuat limbung masyarakat dunia. Virus yang awalnya datang dari Wuhan, China ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa di berbagai sektor kehidupan manusia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi PBB yang menangani masalah Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan (UNESCO) lebih dari 850 juta siswa di seluruh dunia tidak belajar di sekolah. Hal ini disebabkan, banyak negara mengambil kebijakan untuk menutup sekolahnya demi menangkal persebaran Covid-19 yang semakin meluas, termasuk di Indonesia.

Penerapan kebijakan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama pandemi ini tidak pernah sepi dari kritikan. Bahkan, ini menjadi salah satu penilaian masyarakat yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Mendikbud, Nadiem Makarim karena dinilai kurang

cakap dan tanggap dalam menangani persoalan pendidikan selama pandemi.

Bahkan, meskipun pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir 9 bulan, Kemendikbud dinilai masih “gagap” dalam hal pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain itu, ragam regulasi yang dikeluarkan untuk PJJ ini dinilai kurang tepat dan cenderung mubazir. Misalnya pemberian bantuan kuota data internet, tidak digunakan secara maksimal oleh guru dan siswa. Kemudian, masih banyak persoalan yang terjadi selama PJJ.

Kepada *Majalah Carapandang* Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan berbagai kekurangan dalam implementasi pembelajaran berbasis PJJ ini. Berikut petikan wawancaranya:





Bagaimana Anda melihat proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19?

Pembelajaran jarak jauh ini sudah berjalan hampir 9 bulan. Kalau di awal-awal masih terkaget-kaget itu hal yang sangat wajar. Tapi kalau hingga saat ini masih gagap juga berarti ini terkesan tidak dipikirkan.

Berdasarkan hasil pengawasan dari kami, yakni hasil pengawasan di fase pertama pada Maret s.d Juni dan pengawasan fase kedua pada Juli hingga saat ini tidak terjadi banyak

perubahan, meskipun Kemendikbud melalui ragam regulasi untuk membantu agar PJJ ini menjadi lebih baik.

Salah satunya yang terbaru adalah bantuan kuota data internet yang baru sampai 50 persen kepada peserta didik dan para guru. Jika ada kenaikan baru sekitar 55 persen saja sisanya. Meskipun bantuan sampai, bantuan kuota data internet juga tidak maksimal digunakan, sebab mayoritas guru masih menggunakan *WhatsApp* dalam mengajar. Sangat

jarang guru yang menggunakan *Zoom Meeting* atau *Google Meeting*.

Berarti bantuan kuota data internet tersebut mubazir?

Iya, ini sangat mubazir. Bantuan kuota belajar yang diberikan 30 Gb hanya digunakan setengahnya. Jika dirupiahkan, berdasarkan informasi yang kami dapat harga 1 Gb yakni Rp1000,-. Berarti yang terbuang 15 Gb atau senilai Rp15.000,-. Jika yang mendapat bantuan ini misalnya 24 juta siswa berapa rupiah yang

terbuang sia-sia. Ini menurut saya sangat mubazir.

Tidak hanya itu, masih banyak anak yang tidak bisa melakukan daring karena tidak memiliki alatnya. Jadi tidak mungkin mereka bisa menikmati bantuan kuota data internet tersebut.

Selain itu, apakah ada masalah yang lain?

Iya, misalnya kurikulum darurat. Kami sudah datang ke 46 sekolah yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi. Apa hasilnya, sekolah tidak menggunakan kurikulum darurat sebagaimana yang sudah dibuat oleh Kemendikbud. Ini disebabkan karena Mendikbud mengintruksikan untuk memilih. Ketika disuruh memilih banyak sekolah yang tidak memilih kurikulum darurat.

Mengapa sekolah tidak memilih kurikulum darurat tersebut, berdasarkan pengakuan para guru kepada KPAI mereka takut, sebab standar penilaian dan standar kelulusannya tidak diganti, inilah yang menjadi hambatan.

Seharusnya kurikulum darurat untuk meringankan beban PJJ, karena materinya berkurang jika menggunakan kurikulum yang disederhanakan tapi faktanya tidak terpakai.

Apakah PJJ juga menimbulkan masalah-masalah lain yang dialami oleh siswa dan orang tua selama PJJ?

PJJ selama pandemi ini memunculkan banyak kasus pelik. Meskipun dibantah, bahwa terdapat peserta didik yang bunuh diri akibat PJJ, tapi kenyataannya itu terjadi. Memang penyebabnya pasti tidak tunggal, tapi PJJ bisa jadi pemicunya. Hal ini sebagaimana yang terjadi

belum lama ini di Goa.

Kasus lain yang terjadi di Tarakan, anak dianiaya oleh ibunya karena belajar daring. Anak berusia 8 tahun ini meninggal karena dipukul oleh ibunya. Ini artinya bahwa PJJ sudah memakan korban jiwa.

PJJ sudah berjalan 9 bulan, pasti ini menimbulkan kejenuhan. Apa saran KPAI untuk menghilangkan kejenuhan tersebut?

Benar, sejumlah guru mengatakan kepada kami anak-anak yang menghadiri *Zoom Meeting* tidak lebih dari 30 persen, padahal mereka sudah mendapat bantuan kuota data internet. Ini menandakan sudah ada kejenuhan anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran

Maka itu, KPAI mendorong adanya pembukaan sekolah, tapi menggunakan sistem *blended learning* yakni mencampur antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka. Anak-anak masuk sekolah secara bergantian demi menjaga jarak.

Dengan adanya *blended learning* ini materi yang butuh praktek, materi

yang tingkat kesulitannya tinggi bisa diberikan saat pembelajaran tatap muka. Sedangkan materi yang tergolong tingkat kesulitan sedang bisa diberikan melalui pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, apa saran yang ingin disampaikan KPAI kepada Kemendikbud agar pemberlajaran di masa pandemi tetap berjalan baik?

Kemarin KPAI memberikan masukan kepada Kemendikbud dalam rapat kordinasi, kami meminta kepada Kemendikbud untuk melakukan pemetaan sekolah mana yang siap, sangat siap, belum siap dan tidak siap. Jika petanya sudah dapat tentunya dengan koordinasi daerah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah intervensi kepada sekolah-sekolah ini kerjasama dengan pemerintah daerah.

Misalnya sekolah yang sangat siap, boleh buka. Dan sekolah yang siap kurangnya apa? Dilengkapi kekurangan. Bagi sekolah yang belum siap dan tidak siap dibantu dengan anggaran agar mereka menjadi menjadi sangat siap. Ini





dilakukan guna melindungi anak-anak kita. Sehingga sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, dan akhirnya pembelajaran jarak jauh ada ada alternatifnya. Sehingga pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan demikian stress anak dan guru bisa berkurang.

Jadi pembukaan sekolah berdasarkan zona tidak relevan lagi?

Menurut kami iya. Sekarang pembukaan sekolah harus berdasarkan kesiapan sekolah, bukan berdasarkan zona lagi. Walaupun di zona hijau kalau sekolah tidak siap jangan dibuka ini sangat berbahaya bagi keselamatan anak.

Menurut Anda apa yang menjadi masalah penting selama ini?

Ini sebenarnya menjadi tugas kita bersama, semuanya harus bergandengan tangan. Tapi yang menjadi problemnya bergandengan tangan saja tidak. Kemdikbud punya kuasa dengan membuat regulasi jangan didiamkan, pastikan regulasi dipahami oleh daerah. Bikin panduan PJJ tapi daerah tidak paham sehingga sekolah tidak pernah mempraktekan. Jadi ada masalah dalam sosialisasinya.

Kemdikbud tidak bekerja sendiri. Karena teknisnya ada di daerah, sehingga Kemdikbud harus berkoordinasi dengan daerah memastikan semua berjalan.

Contohnya menentukan sekolah

siap atau tidak siap Kemdikbud tidak bisa mendatangi satu persatu. Maka itu harus melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten. Saat rapat kepala sekolah mengisi daftar priksa, sehingga akan terpetakan mana sekolah yang sangat siap, siap belum siap atau tidak siap. Setelah itu gugus tugas Covid-19 mendatangi sekolah-sekolah yang menyatakan siap untuk memastikan kesiapannya.

Menurut KPAI ada lima Siap. Yakni daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua murid siap, dan anaknya siap. Kalau ada salah satu tidak siap maka pembukaan sekolah harus ditunda, sehingga anak-anak tetap terlindungi.



Mendikbud Nadiem Makarim dalam pembukaan Hari Aksara Internasional, Selasa (8/9). Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan buta aksara dengan berbagai strategi yang dilakukan.

HARI AKSARA INTERNASIONAL, KAMPANYE PENTINGNYA LITERASI DIGITAL

Pada tahun ini, peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) dirayakan tidak biasa. Pasalnya, semua aktifitas harus diselenggarakan melalui dalam jaringan (daring). Peringatan ini bertujuan mengingatkan masyarakat agar mengetahui urgensi sadar literasi. Sebab literasi berkenaan dengan martabat dan hak asasi manusia, serta untuk memajukan agenda keaksaraan menuju masyarakat yang lebih sadar huruf dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim hadir dalam seminar peringatan HAI ke-55 tahun ini. Peringatan ini menjadi momentum perubahan paradigma pendidikan melalui pembelajaran literasi di masa pandemi Covid-19.

“Meski tengah mengalami berbagai keterbatasan akibat pandemi Covid-19, kita tetap bersemangat untuk mengingat pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat, untuk

melakukan komunikasi, sehingga kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Mendikbud pada peringatan HAI daring, di Jakarta, Selasa (8/9).

Pada waktu yang sama, salah satu nasumber yang hadir dan sekaligus membuka acara adalah Direktur UNESCO Shahbaz Khan. Dia menyampaikan, Indonesia telah menjadi salah satu contoh negara yang mampu memastikan perkembangan literasi di seluruh penjuru negeri. Namun demikian,

masih terdapat banyak tantangan baru yang telah mempengaruhi sekolah dan pembelajaran di sepanjang kehidupan kita sekarang ini, terutama remaja atau orang dewasa yang tidak atau kurang memiliki kemampuan literasi dasar.

Shahbaz juga menyinggung dampak kebijakan pemberlakuan pembelajaran *online* baik melalui televisi, radio maupun media sosial seperti *YouTube* dan lainnya. Model pembelajaran *online* ini sangat mempengaruhi guru dan peserta didik di seluruh aspek pendidikan.

Pada 2018, UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital.

Literasi sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah bangsa. Ada ungkapan bahwa negara dapat dilihat maju atau tidaknya melalui budaya lieterasinya. Penggunaan internet pada dekade ini menuntut seseorang untuk mempunyai literasi digital untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sangat penting mengingat keseharian yang tidak terlepas dari gadget terutama untuk anak-anak generasi Z.

Pada 2017, Mendikbud juga pernah menyampaikan dalam sebuah sambutan, bangsa yang maju tidak hanya dibangun dengan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi dan aktif.

Memajukan masyarakat dunia berliterasi dan dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara melainkan juga yang lebih penting bagaimana warga bangsa memiliki



kecakapan hidup dan mampu bersaing dan bersanding dengan orang lain, untuk menciptakan kesejahteraan dunia.

Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan tersebut berkolaborasi pikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga dapat memenangi persaingan global.

Istilah literasi merujuk ke pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat serta patuh kepada hukum dalam kehidupan.

Diharapkan dengan kemampuan digital, masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan maksimal tetapi bertanggung jawab penuh atas hal yang dilakukannya. Di Indonesia, literasi digital didukung oleh Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sebagai contoh, SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro, salah satu sekolah yang menjalankan

program literasi disekolahnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Adapun beberapa kegiatan yang biasa dilakukan selama ini adalah dengan mengadakan pelatihan menulis hingga dua dari siswanya menerbitkan sebuah buku puisi, membuat flayer, poster-poster ucapan hari besar dan juga mading atau majalah dinding.

Namun karena pandemi, tidak banyak yang biasa dilakukan, program literasi yang selama ini dilakukan disekolah maka dialihkan dari rumah. Hal ini tentu lebih memanfaatkan media teknologi dalam proses menjalankan programnya tersebut.

“Karena sedang pandemi, kegiatan literasi sementara hanya dilakukan dari rumah. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan adalah seperti membuat ucapan hari besar Nasional, ucapan selamat hari Pahlawan, dan berbagai informasi yang langsung bisa di *share* melalui berbagai media termasuk pelaksanaan ujian sekolah yang dilakukan melalui aplikasi teknologi,” ungkap Helmi selaku guru Bahasa Indonesia di sekolah tersebut, ketika dihubungi tim *Carapandang* melalui *WhatsApp*.

Adv/Amir Rifa'i

ALTERNATIF BELAJAR ONLINE DENGAN SUBSIDI KUOTA

Terpuruknya sektor ekonomi akibat wabah Covid-19 berimbas pada sektor pendidikan. Pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sistem daring membuat banyak orang tua mengeluh. Mereka tidak hanya harus memfasilitasi anak-anaknya dengan telepon selular, laptop atau komputer, namun juga harus menyediakan kuota internetnya.



Ada banyak tantangan lain yang diakibatkan pelaksanaan belajar dari rumah berbasis dalam jaringan (daring), misalnya munculnya kebosanan, seringnya absen, ketidaksiplinan untuk masuk kelas online secara tepat waktu, atau sejumlah kendala lainnya. Namun, apapun tantangannya tidak boleh mengalahkan semangat bersama untuk tetap melanjutkan proses pendidikan secara simultan.

Dunia pendidikan tidak boleh menyerah akibat Covid-19. Meski sudah beberapa bulan, nyatanya proses pembelajaran peserta didik tetap dapat dilakukan dari rumah. Belakangan, sejumlah daerah yang zona bahayanya berwarna hijau atau orange, secara bergantian telah kembali melaksanakan pembelajaran

di kelas secara tatap muka. Meski begitu, berbagai protokol kesehatan tetap dilakukan.

Langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan alternatif cara memberikan kuota internet bagi seluruh peserta didik dan pendidik di Indonesia. Ini dilakukan secara langsung dan masif, sehingga mereka tidak mengalami beban berat untuk melakukan pembelajaran berbasis dalam jaringan (daring).

Kuota internet merupakan hal yang penting dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain gawai dan kekuatan sinyal, kuota internet juga merupakan hal yang banyak dikeluhkan. Bagi orang tua yang mempunyai anak lebih dalam satu rumah yang melaksanakan PJJ mungkin tidak terlalu berat, namun

bagaimana jika dalam satu rumah ada dua atau tiga anak yang melakukan PJJ dalam waktu yang bersamaan?

Masalah pelik ini tidak bisa hanya ditangani oleh orang tua peserta didik. Juga, tidak bisa kuota ini dianggap remeh dengan menyamakannya seperti memberikan uang jajan bagi anak untuk ke sekolah. Anggaran bulanan yang harusnya tidak mencantumkan untuk pembelian kuota data internet, sekarang harus menjadi prioritas utama agar anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan lancar.

Guru dan Dosen pun merasakan hal yang sama. Mereka harus lebih mengeksplorasi kreatifitasnya agar pembelajaran daring dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran tanpa harus menghabiskan banyak

kuota. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (FAI UMM) Muhammad Yusuf meniasati model pembelajaran online-nya dengan blended learning agar tidak habis banyak kuota internet. Jadi, sebagai sumber belajar, kadang mahasiswa diberikan tugas untuk sekedar membaca jurnal/buku, lalu mereviewnya di minggu depannya melalui *zoom* atau *google meeting*.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk membantu mengurangi kendala yang dihadapi dalam PJJ selama ini. Kemdikbud memberikan alternatif bantuan kuota internet bagi peserta didik dan pendidik agar proses belajar-mengajar online ini bisa dipastikan lancar dan tidak menjadi beban berat.

Dalam siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 272/sipres/ A6/IX/2020, Kemdikbud meresmikan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet 2020. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu akses informasi bagi Guru, Siswa, Mahasiswa dan Dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini Kemdikbud bekerjasama dengan 6 (enam) operator seluler yang ada di Indonesia antara lain, Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, AXIS, 3 (Tri) dan Smartfren. Terlaksananya program ini adalah hasil koordinasi antara Kemdikbud dengan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kementerian BUMN serta Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan senilai Rp,7,2 triliun. Bantuan

kuota data internet yang diberikan oleh pemerintah terdiri dari 2 jenis yaitu kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum berarti dapat digunakan untuk mengakses seluruh lama dan aplikasi, sedangkan kuota belajar berarti hanya dapat mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.

Alokasi kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB per bulan. Pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB per bulan, serta untuk Mahasiswa dan Dosen 50 GB per bulan.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, kuota internet telah dibagikan merata kepada seluruh pendidik dan peserta didik yang telah terdaftar. Para orang tua siswa tidak perlu khawatir jika anak-anak mereka belum mendapatkan bantuan kuota, karena mekanisme penyaluran bantuan kuota data internet dilakukan secara bertahap.

Saat ini, Kemdikbud telah menyalurkan bantuan kuota internet kepada 27.305.495 nomor telepon selular pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diyakini akan terus meningkat seiring dengan proses pemuktahiran data, verifikasi validasi, dan penyempurnaan pemuktahiran SPTJM dari pimpinan satuan pendidikan.

Target penerima bantuan kuota data internet kemdikbud sebanyak 50,7 juta peserta didik, 3,4 juta pendidik, 5,1 juta mahasiswa dan 257.217 dosen. Bantuan ini disalurkan langsung ke nomor ponsel yang telah terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jenjang PAUD dan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi, pengelola PD Dikti di tiap perguruan tinggi menginput nomor ponsel Mahasiswa dan Dosen ke PD Dikti. Kuota data internet pun diberikan secara langsung kepada nomor ponsel masing-masing penerima yang telah terdaftar dan bukan dalam bentuk nomor baru atau nomor perdana.

Bantuan kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen ini sudah mulai berdampak kepada masyarakat. Marisa Hakim, seorang ibu yang mempunyai anak yang duduk di SD di daerah Tangerang Selatan mengatakan, "Bantuan kuota internet ini sangat membantu, anak bisa lebih fokus pada pelajarannya tanpa orang tua harus terus menerus mengeluarkan uang untuk beli kuota internet. Namun, Kuota internet baru saya dapatkan bulan lalu. dan untuk bulan Oktober anak saya belum mendapatkan lagi, padahal sudah mau berganti bulan," ujarnya.

Memang tahap kedua penyaluran kuota dilaksanakan pada 28-30 Oktober. Sedangkan tahap pertama telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2020. Kebijakan bantuan kuota data internet ini sebagai upaya pemerintah untuk membantu kesulitan masyarakat terutama orang tua, siswa/mahasiswa dan guru/dosen dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Namun satu hal yang pasti dengan jaringan internet yang lancar, maka belajar dimanapun akan lebih mudah. Lutan informasi yang ada dalam dunia maya bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang bisa untuk meningkatkan kreatifitas anak bangsa.

Adv/Diah Purwitasari, Nafik M

PEMDA DIBERIKAN KEWENANGAN MENENTUKAN BELAJAR TATAP MUKA

Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran Pemerintah Daerah/Kantor Wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama Kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak

dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan. “Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada pengumuman SKB Empat Menteri tersebut, secara virtual, Jumat (20/11).

Pada kesempatan ini, Mendikbud menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan permintaan daerah. “Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Mendikbud mengingatkan agar pemerintah daerah menimbang situasi pandemi dengan matang sebelum memberikan

izin pembelajaran tatap muka.

Lebih lanjut, Mendikbud menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, meski Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah/Kanwil/Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. “Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” ujar Mendikbud.

SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi

PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA SEKTOR PENDIDIKAN HARUS MELALUI PERTIMBANGAN YANG HOLISTIK DAN SELARAS DENGAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA SEKTOR LAIN DI DAERAH

- Nadiem Anwar Makarim





Belajar secara tatap muka di masa pandemi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, memakai masker atau faceshield dan jumlah peserta yang masuk kelas dibatasi.

Covid-19 mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Panduan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan diumumkan selanjutnya.

Koordinasi Pemerintah Pusat Dukung Pemerintah Daerah

Pengumuman panduan penyelenggaraan ini dilakukan segera agar pemerintah daerah dapat bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan. Mendukung dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini, Deputi

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono, mengatakan pentingnya SKB Empat Menteri yang diumumkan hari ini.

“Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Saya berharap para bupati dan walikota dapat mendorong semua sekolah melakukan kesiapan pembelajara tatap muka. Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari komitmen kita bersama, khususnya pemerintah daerah,” kata Sartono saat membacakan pesan Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy.

Kepala Badan Nasional Penang-

gulan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan pula dukungan atas kebijakan yang diumumkan ini. “Satgas Covid-19 mendukung SKB Empat Menteri dalam membuat ketentuan pembelajaran di masa pandemi ini karena banyaknya kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ). Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka,” jelasnya.

“Ke depan, pemerintah daerah sebagai pihak yang paling tahu kondisi di lapangan, perlu mengambil peran dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang paling sesuai dengan wilayahnya masing-mas-

ing. Kebijakan ini adalah langkah yang sangat bijaksana,” imbuh Kepala BNPB.

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mendukung langkah-langkah yang dilakukan dunia pendidikan dengan dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini dan mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menerapkan protokol kesehatan. “Pada prinsipnya Kemendagri mendukung. Kepala daerah perlu melakukan antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru dalam pendidikan,” terang Mendagri.

Turut hadir pada pengumuman ini, Menag Fachrul Razi. “Kemenag telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung PJJ secara daring. Meskipun demikian, pembelajaran tatap muka masih lebih efektif karena adanya ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung,” jelas Menag.

Pada kesempatan yang sama, Menkes Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan meningkatkan peranan Puskesmas dalam menerapkan protokol kesehatan dan mendukung kesiapan sekolah dalam memulai pembelajaran tatap muka. “Pemda diharapkan dapat membuat keputusan tepat dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak, guru, orang tua, dan masyarakat,” tegas Menkes.

Pertimbangan Kepala Daerah

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/

kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.

Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (*thermogun*).

Daftar periksa berikutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19



dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Terakhir, mendapatkan persetujuan Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

Sementara itu, jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta

PEMBELAJARAN TATAP MUKA MASIH LEBIH EFEKTIF KARENA ADANYA KETIMPANGAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG,”

- Fachrul Razi





didik per kelas. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didik/kelas. Pada jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas.

Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan harus menjadi perhatian, seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin.

Selanjutnya, kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka.

Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi dua bulan pertama tidak boleh dilakukan. Setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya. Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama, setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Sementara itu, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah. Kemudian, Satgas Penanganan Covid-19 di daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali, dan

masyarakat sipil dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol Kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan Kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Sementara itu, satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol Kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.

“Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat,” tutup Mendikbud. **Adv/Zulfikar, Amir Fiqi**



MENDIKBUD: GURU ADALAH PELUKIS MASA DEPAN DAN PERADABAN INDONESIA

Setiap tahun, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional atau HGN. Pada HGN tahun ini tema yang diusung adalah “Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar”.

Di tengah krisis pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, upacara peringatan HGN diselenggarakan secara

minimalis dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Upacara bendera diselenggarakan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat, Kantor Kementerian Agama pusat, instansi dan satuan pendidikan di daerah yang berada da-

lam zona hijau dan kuning, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di luar negeri yang wilayahnya ditetapkan pemerintah setempat sebagai zona aman.

Dikutip dari kemendikbud.go.id, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari

Guru Nasional Tahun 2020 pada 25 November 2020 pukul 08.00 WIB. Upacara dilakukan secara tatap muka, terbatas, minimalis dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah tanpa mengurangi makna, semangat dan kekhidmatan acara.

Bangkit di Tengah Pandemi

Dalam Pidatonya Memperingati Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan hikmah tersendiri bagi pendidikan Indonesia. Hikmah yang bisa kita petik banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

“Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya,” ujar Nadiem dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2020 di Jakarta, Rabu (25/11).

Jutaan guru Indonesia, kata Nadiem juga turut serta dalam ribuan *webinar* dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi.

“Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa,” ujarnya.

Nadiem berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium



bersama menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi.

“Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM- SDM Unggul Indonesia Maju,” imbuhnya.

Pada peringatan HGN 2020 Mendikbud memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. “Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski segala keterbatasan,” imbuhnya.

Komitmen perjuangkan hak pendidik

Mas Menteri mengatakan bahwa Kemendikbud dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan,

peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan guru.

“Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu,” tegasnya.

Dia mengatakan, pada tahun 2021 Kemendikbud berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. “Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pintanya.

Di akhir pidatonya Mas Menteri kembali mengucapkan terimakasih yang terhingga kepada para Guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta.

“Terimakasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia,” ujarnya. **Adv**

STRATEGI SRI BANGKIT DARI RESESI

Covid-19 menyebabkan situasi perekonomian dalam negeri kelabakan. Resesi ekonomi sempat terjadi pada kuartal III/2020. Pada kuartal ini, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Namun, perlahan tapi pasti, pelonggaran bagi dunia usaha mulai dilakukan, sehingga diprediksi ekonomi nasional akan kembali bangkit sehingga kuartal IV/2020 bisa ditatap dengan optimis.



Resesi ekonomi yang terjadi belakangan ini memicu Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ambruk. Terjadi penurunan daya produksi dan penjualan ritel, sehingga banyak industri yang kemudian merumahkan para karyawannya. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah mengupayakan sejumlah hal agar ekonomi bisa bangkit kembali.

Menurut Sri Mulyani, beberapa strategi bisa dilakukan untuk mengatasi resesi ekonomi, yaitu: *Pertama*, melakukan program pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan penyerapan anggaran negara, mempercepat penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk program baru, menguatkan program berjalan yang dapat diimplementasikan dan menstimulasi dan memberi relaksasi usaha; *Kedua*, optimalisasi belanja pemerintah di antaranya realisasi THR dan gaji ke-13 serta relaksasi pengadaan barang dan jasa dengan tetap menjaga akuntabilitas; *Ketiga*, memperkuat belanja masyarakat melalui akselerasi bantu-

an sosial, menaikkan besaran bantuan atau belanja perlindungan sosial dan menambah frekuensi atau memperpanjang periode perlindungan sosial.

“Kalau pada kuartal ini kita ingin tidak negatif, maka seluruh kontribusi dari pertumbuhan ekonomi harus diupayakan tumbuh kembali,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari *Antara*, belum lama ini.

Sejak awal, Sri Mulyani optimis bahwa perekonomian nasional bisa melalui masa “gelap gulita” pada kuartal III/2020. Sebab, dibanding sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, ekonomi Indonesia dianggap lebih kokoh meski menghadapi pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak April tahun ini.

Pada Agustus lalu, misalnya, meski ekonomi nasional berkontraksi hingga minus 5,32 persen. Namun, kondisi itu jauh lebih baik dibanding Singapura dan Malaysia yang masing-masing minus 12,6 persen dan 8,4 persen. Kemudian, lebih parah lagi, kontraksi ekonomi Thailand mencapai 12,2 persen dan Filipina 16,5 persen. Sejumlah negara ini kontraksinya mencapai double digit, dan tentu saja ini mengkhawatirkan.

Hingga akhir tahun ini, dan akan berlaku pada tahun depan, diprediksi ekonomi akan segera pulih mengingat geliat perekonomian lokal yang kembali aktif. Berbagai sektor ekonomi dan destinasi pariwisata sudah dibuka kembali, meski ada banyak kenormalan baru yang diterapkan mengingat pandemi yang belum usai.

Apalagi, pemerintah terus menerapkan berbagai strategi percepatan penyerapan anggaran untuk menstimulasi perekonomian sehingga mengurangi kontraksi ekonomi.

“Sejak awal Presiden memberikan arahan untuk melakukan program dan



ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA



Pengunjung mencuci tangan di tempat yang disediakan di Pantai Boom, Banyuwangi, Jawa Timur, Ahad (21/6).

fasilitas yang sifatnya *counter cyclical* untuk mendorong ekonomi domestik khususnya konsumsi masyarakat sehingga tidak membuat ekonomi kita berkontraksi lebih dalam lagi,” jelas Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta di depan para awak media, Senin (10/8).

Pada tahun depan, sejumlah pengamat ekonomi memprediksi ekonomi nasional akan tumbuh jika pemerintah terus mengupayakan strategi percepatan penyerapan anggaran negara. Apalagi, hal ini didukung oleh situasi yang positif dengan dimulainya uji vaksin sejak bulan depan di Indonesia, yang membuat para pelaku ekonomi tidak terlalu khawatir lagi untuk memulai kembali aktifitas bisnisnya. **Nafik M**



RIZIEQ PULANG, OPOSISI SENANG

Muhamamd Rizieq bin Hussein Shihab kembali ke Indonesia pada Selasa (10/10). Kepulangannya disambut gegap gempita oleh massa pengikutnya sejak di Bandara Soekarno Hatta. Rizieq dielu-elukan bak pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Meski mengutarakan alasan klise bahwa kepulangannya ini bertujuan untuk menikahkan salah satu putrinya, Syarifah Najwa Shihab. Tapi sebenarnya, ia adalah magnet bagi kelompok populisme Islam di Tanah Air, yang menjadi poros oposisi pemerintah yang begitu diperhitungkan.



Kepulauan Habib Rizieq disambut antusias oleh ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) di jalanan menuju Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/10)

Tetapi, kasus tersebut tidak dilanjutkan oleh Kepolisian seiring dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Selain kasus itu, tercatat ada beberapa kasus yang menjeratnya, seperti penodaan Pancasila, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga penghinaan terhadap suku tertentu di Indonesia.

Kini, kepulauan Rizieq sontak membuat gaduh. Dimulai dari massa yang berkumpul menyambut di Banda Soekarno-Hatta, hingga kerumunan massa di pernikahan anaknya. Tak pelak, kerumunan ini mengakibatkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak adil dalam pemberlakuan aturan kerumunan massa. Anies pun memenuhi panggilan pihak kepolisian pada Selasa 17/11. Anies dipanggil sebagai saksi untuk mengklarifikasi pasal 93 tentang kekarantinaan. Jika terbukti Anies membiarkan kerumunan tersebut, maka dia terancam hukuman satu tahun pidana penjara. Dalam hal ini, Anies mengaku telah mengirimkan surat peringatan terkait dengan potensi adanya kerumunan warga, namun tidak ada tanggapan dari pihak Rizieq.

Selain Anies, dampak dari hajatan tersebut juga menimpa Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Selain itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy dimutasi, diduga terkait hal yang sama.

Tak sampai di situ, Rizieq Shihab pun bermasalah dengan salah satu artis ibu kota yakni Nikita Mirzani. Hal ini lantaran Nikita Mirzani menyebut Rizieq sebagai tukang obat. Ini memancing reaksi berlebih dari pengikut Rizieq dan berujung ancaman penggrudukan rumah Nikita Mirzani. Karena kasus ini, saling sindir diantara keduanya kerap terjadi. Belakangan, viral di media massa, rizieq Shihab menyebut Nikita Mirzani dengan kata-kata yang kurang pantas diucapkan, seperti lonte dan sebagainya.

Sepak Terjang Rizieq Shihab

Bisa dikatakan, Rizieq Shihab menikmati buah Reformasi. Pasca tumbanganya Orde Baru (1998), Rizieq mendirikan Front Pembela Islam (FPI). Dalam perjalanan politik, FPI kerap dimanfaatkan oleh elit militer dan politik dalam intrik-intrik kekuasaan, sehingga pada satu sisi keberadaannya yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan dicibir masyarakat, namun ia begitu diistimewakan oleh aparat pada sisi yang lain. Seringkali aparaturnegara membiarkan FPI melakukan *sweeping* kegiatan tertentu yang dianggap meresahkan masyarakat.

Dengan perlakuan yang istimewa itu, para anggota FPI kerap main hakim sendiri. FPI cenderung anarkis dalam penerapan hukum kepada masyarakat. Misalnya, *sweeping* pada *club* malam dengan pengrusakan fasilitas di dalamnya. Puncaknya, saat FPI menyerang aksi damai Alisansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas, dan mengakibatkan Rizieq terkena hukuman pidana setengah tahun penjara.

Polisi seperti kewalahan dan tak berdaya menghadapi Rizieq dan FPI. Rizieq mempunyai gerakan

Kepergian Rizieq ke Arab Saudi dengan alasan umrah pada April 2017. Namun, sebulan kemudian, belum selesai umrahnya, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka atas kasus *chat* mesumnya dengan Firza Hussein oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Rizieq terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.



Salah satu tujuan kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia adalah untuk menghadiri dan menyaksikan pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab

massa yang besar bahkan bisa menyerang lawan politiknya secara hukum. Seperti diketahui, Rizieq bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, memaksa pemerintah memidanakan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuduhan mencemarkan atau menistakan ayat Suci Al-Qur'an. Setelah melewati masa-masa sulit dan penuh intrik antara pengikut Rizieq dan Ahok, Ahok pun dihukum penjara selama dua tahun.

Pemerintah dalam hal ini polisi terlihat berhati-hati dalam hal memperlakukan Rizieq. Hal ini patut dimaklumi, mengingat rizieq adalah sosok berpengaruh bagi pengikutnya dan mempunyai basic massa besar. Jika salah langka, bisa mengakibatkan *chaos* diantara pendukungnya.

Kehati-hatian pemerintah dalam

memperlakukan Rizieq sudah terlihat sejak pencabutan kasus *chat* mesum Rizieq. Hal ini mengindikasikan pengaruh besar Rizieq Shihab pada politik tanah air. Tak heran banyak pihak menilai, pemerintah memainkan politik dua muka. Di sisi lain pemerintah berupaya memberantas intoleransi dan radikalisme berbasis agama, namun dengan pemberian keistimewaan pada Rizieq Shihab, justru melanggengkan intoleransi itu sendiri.

Rekonsiliasi Ditolak

Tawaran rekonsiliasi untuk menghentikan politik balas dendam diajukan Rizieq Shihab pada video yang dikirim dari Madinah kepada pengacaranya. Dalam video yang dikirim pada Mei tersebut, Rizieq meminta pemerintah agar segera melakukan rekonsiliasi. Rizieq meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama dan menegaskan bahwa FPI tidak memusuhi pemerintah, tapi mush FPI adalah

kemunggaran.

Ajakan rekonsiliasi disambut tanda tanya oleh Pemerintah. Pemerintah mempertanyakan apa yang harus direkonsiliasi Rizieq. Pasalnya dia meminta pembebasan Ulama. "Bebaskan dulu para tokoh kita, masih banyak ulama kita yang saat ini menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith, bebaskan dulu Doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, bebaskan Jumhur Hidayat, bebaskan dulu. Bebaskan buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan pelajar yang saat ini memenuhi ruang-ruang tahanan," ucapnya.

Jika melihat latar belakang politik antara Presiden Jokowi dan Rizieq Shihab, upaya rekonsiliasi sepertinya tidak akan terjadi pada kedua belah pihak. Rekonsiliasi tersebut mungkin hanya meredakan tensi politik di permukaan saja untuk menenangkan situasi. Namun sulit jika menenangkan



Jakarta. Kedatangan Rizieq menjadi amunisi baru bagi kelompok oposisi pemerintah. Apalagi kelompok oposisi ini terbilang minoritas, kecil dibandingkan dengan kelompok pendukung pemerintah. Karena itu, diyakini suara minoritas tersebut akan lebih nyaring dengan kedatangan Rizieq Shihab.

Sebenarnya, para tokoh oposisi sudah terkoneksi dengan Rizieq sejak berada di Arab Saudi. Apalagi, PKS sudah menyatakan dukungan terhadap revolusi akhlak yang digalakkan Rizieq. Gelagat para tokoh politik mendatangi rumah Rizieq membuktikan bahwa FPI mempunyai hubungan erat dengan kelompok oposisi.

Kedatangan Rizieq dianggap mampu membangkitkan semangat masyarakat yang selama ini dianggap mulai takut bersuara. Mengingat Rizieq adalah sosok yang agresif pada pemerintahan Jokowi. Dinamika politik Indonesia diprediksi akan mengalami banyak perubahan dengan hadirnya Rizieq Shihab yang dianggap mampu merangkul kelompok oposisi. **Ika**

tensi politik di titik terendah. Perbedaan politik mendasar di antara kedua kubu ini menjadi penyebab sulitnya rekonsiliasi digelar.

Menyadari ajakan rekonsiliasi tidak disambut baik oleh Pemerintah. Rizieq Shihab sepetinya mulai geram. Dalam kanal Youtube Front TV, Rizieq berkoar, “Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau mungkin dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog penting,” katanya.

Rizieq menilai, seharusnya pemerintah senang dengan ajakan rekonsiliasi tersebut. Namun kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan tidak ada yang perlu direkonsiliasikan dengan FPI terutama Rizieq Shihab. Menurut Moeldoko, tidak ada masalah antara Pemerintah dan FPI, sehingga tidak perlu ada yang dibicarakan. Hal itu dibuktikan dengan kepulangan Rizieq yang tidak

ada hambatan di Indonesia. Justru Moeldoko meminta agar dikawal dengan sangat hati-hati oleh aparat.

Dukungan pada Rizieq terus bertambah. Sejak kedatangannya, terpantau adanya kunjungan dari Amien Rais dan beberapa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) silih berganti mendatangi rumah Rizieq Shihab di Petamburan,



Salah satu spanduk menyambut kedatangan Imam Besar FPI dibentangkan oleh warga Petamburan III.



KEMENANGAN AZERBAIJAN, SISA LUKA BAGI ARMENIA

Setelah 6 minggu lebih dua hari perang Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh bergolak, akhirnya berhenti belum lama ini pasca dibuatnya perjanjian damai atas mediasi Rusia (Selasa, 10/11). Perjanjian tersebut dianggap hanya menguntungkan Azerbaijan, sementara Armenia kian terluka karena semua pasukannya di Nagorno-Karabakh harus ditarik di wilayah yang sebelum perang ini berkecamuk, telah dikuasainya.



Atlanticcouncil.org pada Rabu (11/11) melaporkan, perjanjian perdamaian antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno - Karabakh tidak lain hanyalah kesepakatan yang sejak awal direncanakan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev. Kecamuk perang yang dimulai sejak 27 September 2020 itu memang telah diharapkan oleh Aliyev agar kembali pada “Prinsip Dasar” (*Basic Principles*)

penyelesaian konflik yang sudah disepakati Azerbaijan dan Armenia pada 2009.

Perjanjian Perdamaian ini berisikan: *Pertama*, penarikan kembali seluruh pasukan Armenia dari tujuh wilayah Azerbaijan di Nagorno – Karabakh; *Kedua*, membuka kembali semua rute transit antara Azerbaijan, Armenia dan Turki; *Ketiga*, pemberian status sementara wilayah otonom Nagorno – Karabakh diikuti dengan janji penetapan status sendiri di kemudian hari melalui pemungutan suara; *Keempat*, kembalinya masyarakat Azerbaijan; *Kelima*, menghubungkan kembali jalur transportasi yang aman antara Armenia dan Nagorno – Karabakh; *Keenam*, menjaga perdamaian dunia.

Hanya dengan melihat poin 1 perjanjian perdamaian di atas, sebenarnya pahit kekalahan Armenia pada perang di Nagorno – Karabakh amatlah jelas. Sebab, objek sengketa yang menjadi akar permasalahan adalah status penguasaan wilayah Nagorno – Karabakh. Kembalinya Nagorno – Karabakh ke pangkuan Azerbaijan adalah kemenangan Azerbaijan di satu sisi dan kalahnya Armenia di sisi lainnya.

Perdamaian Bukan untuk Armenia

Apabila dikalkulasikan, korban jiwa peperangan antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno – Karabakh

amatlah banyak. Menurut *ZonaJakarta* pada Kamis (12/11) kemarin, korban jiwa yang jatuh dari prajurit pemberontak plus Armenia telah mencapai 1.300 jiwa. Jauh sebelum itu, bahkan versi Presiden Rusia, Vladimir Putin sebagaimana dikutip *Antarnews* pada Jumat (23/10), korban jatuh dari kedua belah mencapai 5.000 orang. Masing-masing pihak diprediksi telah kehilangan sekitar 2000-an jiwa.

Usaha Armenia dalam merebut Nagorno – Karabakh, tampaknya seperti ‘mencincang air’, kendati sudah banyak memakan korban jiwa, namun hasilnya tetap nihil. Sontak saja, ribuan warga Armenia yang marah menggelar demonstrasi dan mengepung seluruh jalanan di ibu kota Yerevan, menuntut agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan.

Makian dan celaan pun muncul baik dari warga sipil maupun oposisi pemerintahan Perdana Menteri Nikol Pashinyan. Sebagaimana dilansir dari *The Guardian*, pada Rabu (11/11), Pashinyan dianggap sebagai pengkhianat lantaran lupa akan jasa pejuang Armenia di era 1990-an yang merebut Nagorno - Karabakh.

Aksi pertikaian pun tak luput dari sasaran amukan warga Armenia, dari *Turkinesia.net* dikabarkan bahwa Ketua Parlemen Armenia, Ararat Mirzoyan, dipukuli dan ditelanjangi oleh warga.



Sejumlah fasilitas publik di kantor parlemen Armenia rusak parah. Seruan untuk mundur dari jabatan perdana menteri digaungkan oleh demonstran di sana sini.

Padahal, saat terpilihnya Pashinyan menjadi Perdana Menteri di tahun 2018, warga Armenia secara gegap gempita menyambut kepemimpinannya.

“JIKA PEPERANGAN TERUS DILAKUKAN, MAKA BLOKADE MILITER AZERBAIJAN TERHADAP BEBERAPA WILAYAH JUGA AKAN MELUAS, SEHINGGA BUKAN LAGI HASIL YANG BERTAMBAH, NAMUN KERUGIAN YANG SEMAKIN MEMBENGKAK”

- Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan.

Pashinyan dianggap sebagai seorang revolusioner yang mampu mengubah tatanan rusaknya demokrasi di Armenia. Bahkan jika mengacu pada laporan *BBC News* pada Senin (10/12/2018), para pengkritiknya, amat takut dengan popularitas Pashinyan yang mendapatkan 70% suara dalam pemilu.

Alasan di balik sepakatnya Pashinyan terhadap perjanjian perdamaian tersebut tidak lain adalah keselamatan warga Armenia yang diprioritaskan. Menurutnya, jika peperangan terus dilakukan, maka blokade militer Azerbaijan terhadap beberapa wilayah juga akan meluas, sehingga bukan lagi hasil yang bertambah, namun kerugian yang semakin membengkak.

Memang, jika diperhatikan secara saksama, perjanjian perdamaian tersebut tak hanya berbicara soal kemenangan atas kembalinya wilayah Nagorno – Karabakh ke Azerbaijan, namun juga persoalan kemandirian Nagorno – Karabakh di kemudian hari untuk menentukan sikapnya melalui pemungutan suara (referendum).

Svante E. Cornell dalam laporan *The*



Nagorno – Karabakh Conflict menguraikan bahwa etnis Armenia sudah ada sejak abad ke-empat sebelum masehi. Hal ini diketahui sebab Nagorno – Karabakh merupakan bagian dari kerajaan Armenia yang berkuasa sejak 321 SM – 428 M (1999:5). Sejarah mencatat, meski kerajaan Armenia jatuh di tangan Persia Safawi dan Dinasti Ottoman, lalu berganti pada era kekaisaran Rusia pada ke-18 hingga ke-20, Nagorno – Karabakh masih merupakan bagian dari Armenia.

Setelah beralihnya kekaisaran Rusia ke Uni Soviet, awalnya wilayah Nagorno – Karabakh diberikan kepada Armenia sesuai dengan keputusan Stalin pada tahun 1920. Dalam artikel *Peran dari OSCE Minsk Group dalam Mediasi Konflik di Wilayah Nagorno Karabakh*, I Putu Angga Prasada dkk (2015) menyebutkan



“Senyum dan Senang. Rakyat Azerbaijan mengibarkan bendera negaranya untuk merayakan perjanjian damai dengan Armenia dalam rangka menghentikan peperangan di wilayah Nagorno-Karabakh.

bahwa pasca diberikannya status Nagorno – Karabakh ke Armenia, pemimpin Azerbaijan, Nariman Narimanov memprotes keputusan tersebut. Hingga akhirnya status penguasaan Nagorno – Karabakh beralih ke Azerbaijan.

Semasa kepemimpinan Uni Soviet, sebenarnya protes warga Nagorno – Karabakh terhadap keinginannya untuk bergabung dengan Armenia tidaklah separah dan semengkhawatirkan seperti saat ini. Aksi protes hingga memunculkan kecamuk peperangan baru terjadi di detik-detik terakhir kepemimpinan Mikhail Gorbachev.

Mengetahui situasi Uni Soviet yang

sudah mendekati ‘ajalnya’ di tangan Gorbachev, Nagorno – Karabakh tak ingin kehilangan momentum untuk membebaskan diri dari Azerbaijan dan Rusia. Secara *de facto* pada 10 Desember 1991 Republik Nagorno – Karabakh memproklamirkan diri.

Namun nahas, Ibarat pepatah belum beranak sudah ditimang, momentum yang dianggap sebagai kesempatan ‘emas’ tersebut harus pupus. Masih termasuknya Nagorno – Karabakh sebagai wilayah Azerbaijan secara *de jure* mengakibatkan proklamasi kemerdekaan tersebut mustahil terjadi jika tanpa kesepakatan Azerbaijan. Sedangkan di sisi lain, Azerbaijan masih berkukuh untuk mempertahankan Nagorno – Karabakh dalam genggamannya.

Atas problematika di atas,

peperangan demi peperangan antara Azerbaijan dan Armenia terjadi. Bagi Azerbaijan, mempertahankan Nagorno – Karabakh adalah suatu simbol nasionalisme demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan bagi Armenia, Nagorno – Karabakh adalah identitas etnis yang harus dilindungi kebebasannya. Bagi Armenia, menaruh Nagorno – Karabakh bukan pada negara asalnya adalah usaha pengekanan.

Negara - negara bekas Uni Soviet termasuk Azerbaijan dan Armenia memang terkenal dengan primordialnya. Rasa nasionalisme dan kebangsaan muncul atas dasar kesamaan etnis yang mendominasi suatu wilayah. Inilah yang menyebabkan mengapa daerah – daerah tersebut terkenal dengan etnonasionalismenya.

Donny Hermaswangi dalam penelitian *Kebijakan Vladimir Putin Terhadap Gerakan Etnonasionalisme Chechnya di Rusia Tahun 2000 – 2005*, menyebutkan bahwa runtuhnya Imperium Rusia dan beralihnya kepemimpinan Rusia di bawah kuasa Partai Komunis, Vledimir Lenin, meysisakan berbagai permasalahan etnis. Lebih dari 100 etnis warisan Imperium Rusia menuntut hak-haknya yang sejak berabad-abad tertekan. Permasalahan di Nagorno – Karabakh hanyalah salah satunya.

Kini setelah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Azerbaijan dan Armenia, tampaknya ‘bara dalam sekam masih menyala’. Pihak Armenia yang merasa tidak ada hasil atas segala upaya peperangan selama lebih dari enam minggu, lagi-lagi harus bersabar. Ketidakpuasan Armenia hari ini patut dipertimbangkan sebagai pertanyaan tentang “apakah konflik ini akan terus berlanjut?”. **Nabil**

DI BALIK ANTUSIASME DAN PRAGMATISME PILPRES AS

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) dalam lintasan sejarah selalu menyita perhatian dunia. Hal ini karena AS adalah negara adidaya yang berdaya magnet untuk negara-negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Keputusan politik di Negeri Paman Sam tersebut akan memengaruhi “hitam-putih” negara-negara lainnya.



Hingga tulisan ini dimuat, *The Associated Press (AP)*, pada Rabu (11/11), pukul 14:29 WIB menyebutkan bahwa pasangan calon Biden – Harris unggul sebanyak 290 suara elektoral dari pasangan calon pertahana Trump – Pence, yang memperoleh 214 suara. Meski beberapa negara bagian dalam peta perolehan suara yang dirilis oleh *AP* masih berwarna merah muda dan biru muda – seperti Alaska, Georgia dan North Carolina, hasil perolehan ini cukup menunjukkan bahwa Biden adalah calon presiden terpilih yang layak menghuni White House sebagai Presiden AS ke-46.

Jauh sebelumnya, pasca diumumkan perolehan 20 suara elektoral di Pennsylvania pada Jumat (6/11), *AP* sudah tergesah-gesah memberitakan kemenangan Biden dalam publikasinya – yang kini sudah

Pidato Kemennagan Joe Biden. Dia berharap Rakyat Amerika Serikat bersatu dan saling pengertian



dihapus – berjudul “*Biden wins White House, vowing new direction for divide US*” pada Sabtu, (7/11) pukul 11:26 waktu setempat. Sontak saja, hal ini menandakan bahwa Pilpres AS sudah memasuki babak *injury time*.

Partisipasi Terbesar

Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit diprediksi. Wabah Covid-19 yang berdampak pada krisis kesehatan, ekonomi, politik dan pertahanan dunia, sulit dikendalikan. Pendapat Yuval Noah Harari dalam buku *Homo Deus* (Manusia Tuhan) yang menganggap umat manusia dewasa ini laksana tuhan lantaran mampu menyelesaikan beragam tantangan zaman, tidak lagi relevan.

Penyelenggaraan Pilpres AS 2020 di tengah pandemi Covid-19 tergolong langkah yang nekat. Kendati masih banyak negara lain yang berkukuh menyelenggarakan pemilu semasa pandemi - seperti Indonesia, Bolivia,

Belarusia dan Korea Selatan – persoalan di AS tentu saja berbeda. Amerika Serikat merupakan negara dengan peringkat pertama kasus kematian Covid-19 tertinggi di dunia, yakni lebih dari 230.000 jiwa.

Ditinjau dari partisipasi pemilihnya, siapa sangka di tengah masa *social distancing*, jumlah pemilih Pilpres kali ini meningkat begitu drastis. Sebagaimana dikutip *Vox* dari Profesor di University of Florida, Michael McDonald (4/11), partisipasi pemilih sebanyak 66,9% dari total keseluruhan penduduk AS, menjadikan Pilpres AS 2020 ini sebagai kontestasi dengan partisipasi pemilih terbanyak sejak 120 tahun terakhir.

Keunikan lonjakan partisipasi pemilih di AS dapat ditinjau dari dua aspek, yakni motivasi pemilih dan sistem pemilihannya. Pada aspek yang pertama, Pilpres bagi rakyat AS merupakan agenda penting yang mungkin akan mengubah arah perjalanan pemerintahan AS ke depan.

Mengingat perilaku Presiden Donald Trump yang selalu meremehkan bahkan menuduh Covid-19 sebagai konspirasi media, isu rasialisme dan hubungan diplomatik luar negeri. Warga AS merasa terpanggil untuk menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan aspirasinya. Mungkin, bagi persepsi sebagian besar rakyat AS menunda Pilpres bukanlah solusi yang dapat memperbaiki problematika hari ini. Namun sebaliknya, hanya dengan Pilpreslah problematika hari ini dapat diselesaikan.

Hal ini selaras dengan publikasi *Vox* pada Rabu (4/11) kemarin yang menyatakan bahwa lonjakan antusiasme partisipasi pemilih terjadi lantaran isu-isu rasialisme yang menguat di kalangan masyarakat. Hampir di seluruh penjuru platform



Salah satu warga AS memenuhi haknya memberikan suara dalam Pilpres AS beberapa waktu lalu

media sosial, jalanan, serta berbagai pusat keramaian selalu dihiasi pesan “*Get out the vote!*” (pilihlah!).

Pada aspek sistem pemilihannya, lonjakan partisipasi pemilih juga didukung oleh teknik pengumpulan surat suara yang kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya teknik pemungutan suara melalui kantor pos hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang memiliki kesibukan di luar negeri, *Federal Election Commission* (FEC) – semacam komisi pemilihan di negara-negara bagian – pada Pilpres kali ini memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk menyalurkan suara melalui kantor pos.

Mereka yang menggunakan kantor pos sebagai sarana menyumbang suara, secara teknis dilakukan sebelum

pemungutan suara secara langsung, yakni pada tanggal 3 November 2020. Hal inilah yang menjadi alasan bagi mereka yang melaksanakan pemungutan suara melalui kantor pos disebut *early voter* (pemilih awal).

Cara ini dianggap cukup efektif untuk mendongkrak partisipasi pemilih. *U.S. Election Project* pada hari Jumat (6/11) pukul 02:07 waktu setempat melaporkan bahwa jumlah *early votes* bahkan mencapai angka 101.423.318 pemilih. Angka ini sungguh fantastis, sebab jika dibandingkan dengan pemilihan secara langsung (*In-Person Votes*) yang hanya memfasilitasi 35.935.583 pemilih, maka *early votes* berada pada jumlah yang hampir tiga kali lipat.

Dulu Republik, Sekarang Demokrat

Berbicara soal kendaraan politik dalam Pilpres AS kali ini, sejatinya tak hanya berbicara soal Republik atau Demokrat semata. Selain dua partai politik bersimbol gajah dan keledai

tersebut, masih banyak partai dan pasangan calon dari jalur independen lainnya. Dilansir dari BBC News (10/10), terdapat 1.214 kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden, sedangkan dalam daftar analisis perolehan suara yang oleh Ballotpedia publikasikan (8/11), terdapat 36 calon dengan perhitungan suara.

Sulit dipungkiri bahwa posisi dua partai ‘raksasa’ yang selalu *vis a vis* dalam pemilu kerap kali mensugesti alam sadar mayoritas masyarakat untuk menegasikan kehadiran partai dan pasangan calon yang lainnya. Bagi rakyat AS mencari pilihan selain kedua partai tersebut, mungkin hanya buang-buang tenaga. Sebab, persentase kemenangan yang amat kecil, menjadikan aspirasinya terbuang sia-sia.

Meski sama-sama memiliki sistem perekonomian yang mendukung kapitalisme, Republik dan Demokrat memiliki haluan ideologi yang berbeda. Jika ideologi Partai Republik adalah konservatif, maka Partai Demokrat adalah liberal. Keadaan yang seakan saling bertolak belakang ini, diindikasikan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2008:214) sebagai negara yang menganut sistem dwi-partai.

Miriam Budiardjo dari Robert Dahl juga menyatakan bahwa selain keuntungan atas terpeliharanya dialog yang demokratis antara pro pemerintah dan oposisi, sesungguhnya sistem dwi-partai juga melanggengkan perpecahan antara dua kubu tersebut. Masyarakat menjadi amat tendensius tatkala pemilu, terlebih identifikasi warna di AS bahwa merah adalah Republik dan biru adalah Demokrat semakin memperparah kondisi.

Menariknya, dalam beberapa kali Pilpres AS tendensi ini tak lagi signifikan. Banyak simpatisan dari



Pendukung Joe Biden merayakan kemenangan di jalan-jalan di Amerika Serikat

haluan Republik beralih ke Demokrat, begitu pun sebaliknya. Jika pada Pilpres AS 2016 yang lalu, kubu Demokrat kaget dengan beralihnya dukungan negara bagian Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, dan Maine ke calon dari partai Republik, Trump – Pence. Kini giliran Republik yang kaget dengan peralihan dukungan Georgia dan Arizona ke sisi Joe Biden – Harris.

Pragmatisme dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di AS menunjukkan suatu sifat yang positif dalam rangka menilai kebijakan. Sesuai dengan landasan filosofisnya, pemilu tak hanya sekedar formalitas untuk melegitimasi kekuasaan pemimpin terhadap rakyatnya, namun pemilu juga sebagai ajang evaluasi terhadap pemimpin

yang dahulu sudah dipilih.

Hal ini terbukti dari fakta tidak terpilihnya kembali Donald Trump pada Pilpres kali ini. Sebab, sejak 28 tahun terakhir, hampir setiap pertahana yang mencalonkan diri kembali dalam Pilpres AS selalu menang. Bahkan AP dalam publikasinya pada Sabtu (7/11) kemarin menyebutkan bahwa rakyat AS telah melaksanakan referendum untuk mempertahankan atau melengserkan Presiden Donald Trump.

Pelajaran Politik

Pilpres AS 2020 telah berlalu, masyarakat dunia telah menyaksikan dengan saksama pemilihan orang nomor satu di negeri paman Sam tersebut. Dinamika partisipasi dan konstelasi politiknya telah tercatat dalam sejarah. Kini, giliran bangsa Indonesia yang memilah dan memilih pelajaran apa yang patut untuk dicontoh. George Santayana

dalam Amin Rais (2008: 2) pernah menyebutkan “*Those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them*” (Mereka yang gagal dalam mempelajari sejarah akan dihukum untuk mengulangi sejarah tersebut).

Kondisi negara yang terlanjur mengutamakan Pilkada Serentak dibanding penanganan Covid-19 tak elok jika diperdebatkan melulu. Kini, giliran bangsa Indonesia yang mencontohkan bahwa di tengah wabah mematikan ini, nuansa demokratis Pilkada Serentak tetap terjaga disamping perlindungan terhadap warga negaranya.

Sudah waktunya bagi bangsa ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya Amerika Serikat yang mampu bersinergi antara rakyat dan pemerintahnya dalam upaya merawat demokrasi. Bukan hanya Amerika semata yang mampu menegasikan fanatisme partai politik dalam pemilu, namun bangsa Indonesia juga. **Nabil**

Jalan Terjal Judicial Review UU Ciptaker

Keesokan paginya, 3/11, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan gugatan uji materi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan Uji Materi UU Cipta Kerja itu teregistrasi di laman resmi MK dengan nomor tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020 dengan pokok perkara pengujian materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker terhadap UU Dasar 1945. Pemohon dalam gugatan ini ialah Said Iqbal dan Ramidi selaku sekretaris jenderal KSPI.

Said juga menyatakan, KSPI tidak hanya mengajukan uji materiil ke MK, tapi juga melakukan strategi konstitusional lainnya. Menurut Said, pihaknya akan melanjutkan aksi dengan prinsip antikekerasan, legislative review, dan kampanye ke masyarakat tentang pasal UU Ciptaker yang merugikan buruh dan rakyat. “Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata Said.

Kemudian, pada Kamis 5/11, dilaksanakan sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti yang terlihat dalam kanal youtube MK, hakim konstitusi memberi sejumlah masukan untuk perbaikan gugatan.

“Sekali lagi, saudara dari federasi ini untuk betul-betul bekerja lagi, cermat memperbaiki. Jangan salah dan keliru di nomor-nomor pasal *omnibus-nya* dan di nomor-nomor pasal yang dimohonkan pengujian, terlebih kalau pasal

Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/11). Presiden menandatangani naskah UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini pada Senin (2/11) dan resmi diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal yang sama.



itu juga merujuk ke ayat di atasnya,» ujar Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, pada sidang yang dilakukan secara virtual tersebut.

Jalan Panjang Judicial Review

Dalam sidang perdana tersebut, hakim meminta untuk tidak menggeneralisir gugatan sehingga mengakibatkan ketidaksinkronan dengan petitum. Selain itu pemohon diminta untuk memberikan nomor UU Cipta Kerja lantaran masih kosong. Ditambahkan oleh Hakim Konstitusi, Manahan MP Sitompul, agar pemohon memberikan kedudukan hukum yang jelas, apakah berupa perseorangan ataukah badan hukum serta menegaskan kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Di akhir sidang, Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, menyatakan agar pemohon segera menyerahkan perbaikan

permohonan selambat-lambatnya 17 November 2020.

Bisa dikatakan, Judicial review adalah satu-satunya cara bagi KSPI, untuk memperjuangkan hak-haknya, setelah sebelumnya demonstrasi menuntut penerbitan Perppu tidak ditanggapi oleh Pemerintah. Pengajuan permohonan uji materiil kepada MK juga sebagai refleksi kepatuhan dan partisipasi hukum masyarakat Indonesia yang semakin baik.

MK sebagaimana telah tercantum dalam pasal 24C UUD 1945 dan pasal 9 UU No. 12 tahun 2011 memang mempunyai kewenangan uji materi UU terhadap Konstitusi. Namun, sepertinya perjuangan kaum buruh agar putusan MK dapat mencabut atau menghapus seluruh UU jauh panggang daripada api, lantaran selama ini putusan MK

Imroatus Solihah

Staff di Laboratorium Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhamamdiyah Malang



hanya dapat menghapus pasal-pasal yang bertentangan dengan Konstitusi, tidak dapat mencabut atau menghapus UU seluruhnya.

Sebenarnya, MK mempunyai kewenangan untuk mencabut UU seluruhnya jika dirasa pembuatan UU tersebut tidak sesuai prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pendapat, Prof. Jimly Asshiddiqie, menurutnya proses pembentukan Undang-Undang dianggap melanggar UUD jika melanggar prinsip konstitusi, MK berwenang menyatakan proses pembentukan bertentangan dengan konstitusi sehingga Undang-Undang tidak berlaku untuk seluruhnya.

Menurutnya, *judicial review* ada dua jenis, yaitu uji materi dan uji formil. Selama ini, yang lebih sering bahkan hampir selalu diajukan adalah uji materi. Adapun uji formil, pernah juga dimintakan ke MK dan MA (untuk peraturan perundangan di bawah Undang-Undang) tetapi belum ada satu pun yang dikabulkan. Dalam kasus UU Cipta Kerja, Jimly melihat ada peluang untuk pengajuan baik uji formil maupun uji materi. Bahkan, kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali bisa membuat preseden putusan uji formil melalui *judicial review* UU Cipta Kerja.

Upaya-Upaya Konstitusi Rakyat

Selain *judicial review*, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan *judicial review*. *Pertama, Executive Review*, dengan penerbitan Perppu oleh presiden dan pemerintahannya. Meski langkah ini sudah pasti tidak ditempuh pemerintah, mengingat presiden Jokowi telah menandatangani UU Cipta kerja, terlebih lagi inisiatif UU Cipta Kerja datang dari presiden Jokowi yang ingin menggenjot investasi.

Namun sebenarnya, secara yuridis normatif, Perppu dapat mencabut UU. Hal ini sempat terjadi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2014 dan Perppu No 2 Tahun 2014 yang pada intinya membatalkan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan mengembalikan pemilihan

kepala daerah agar dipilih langsung oleh rakyat.

Meski konteks UU berbeda, dalam hal ini UU Cipta Kerja lebih kepada pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan sebagainya. Sedangkan UU yang dibatalkan oleh SBY, lebih pada pembatasan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Namun sejatinya keduanya memiliki ujung tujuan yang sama yakni keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hal lain yang harus diketahui adalah, penerbitan Perppu harus dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apakah situasi saat ini –penolakan UU Cipta Kerja- merupakan situasi genting?

Kedua, Legislative Review; DPR bersama Pemerintah dapat melakukan Revisi terhadap UU Ciptaker atas urgensi tertentu yang mendesak. Upaya ini dapat merevisi proses pembentukan UU Ciptakerja menjadi lebih transparan dan mengedepankan partisipasi publik. Pembuat kebijakan memperhatikan partisipasi dan aspirasi publik kemudian merumuskannya dalam materi muatan. sekaligus menghapus pasal-pasal kontroversial serta menambahkan pasal-pasal yang pro buruh sehingga mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Namun upaya ini tentu harus inisiatif atau *political will* dari pembuat kebijakan, apakah itu mungkin?

Upaya terakhir adalah *judicial review*. *Judicial review* seringkali menjadi senjata bagi Pemerintah membungkam protes UU Cipta Kerja dengan dalih “*ajukan judicial review saja jika menolak UU Cipta Kerja*”!!. *Judicial review* tentu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit mengingat mekanisme persidangan permohonan *judicial review* yang panjang tetapi putusan yang didapat tidak seimbang dengan keinginan masyarakat untuk pencabutan seluruhnya pada UU Cipta Kerja.

Ditambah lagi dengan sikap pemerintah yang seolah-olah tidak mau tahu terhadap akibat dari pengesahan UU Cipta Kerja, padahal pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu. Ini merupakan bentuk sikap arogansi dan ketidaktanggungjawaban pemerintah atas desakan desakan publik untuk menelaah kembali UU Cipta Kerja.

Refleksi Hari Guru Nasional

Tantangan Guru di Era Digital

“Ing ngarso Sung Tulodo”, Pendidik hendaknya menjadi teladan bagi anak didiknya. “Ing madyo Mangun Karsa”, Pendidik hendaknya berperan untuk membangun kemauan belajar pada diri anak didik. “Tut Wuri Handayani”, Pendidik hendaknya berperan sebagai pembimbing anak dalam belajar, mengembangkan bakatnya serta membantu memandirikan peserta didik.

Setiap 25 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Tanggal tersebut menjadi sejarah penting karena bertepatan dengan kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada 1912, organisasi ini bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Namun pada 1932, namanya berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).

Maju dan mundurnya bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas guru dalam mendidik peserta didiknya. Fakta sejarah telah membuktikan hal ini, di era pra kemerdekaan para guru menanamkan patriotisme kepada peserta didiknya. Jiwa patriotisme ini yang pada akhirnya menjadi modal semangat para kaum muda penerus perjuangan bangsa.

Tujuan peringatan HGN tidak lain untuk mengenang perjuangan para guru yang sejak awal mengalami banyak tantangan. Selain mendidik, para guru mempunyai tugas lain menjaga kehormatan bangsa dan negara dalam melawan penjajah.

HGN perlu diperingati dengan cara yang lain, misalnya dengan menorehkan prestasi, berkarya dan berinovasi yang memberikan kemanfaatan sekitar. Bermula dari peran guru, bangsa yang besar ini bisa berdiri seperi sekarang. Dari guru, keteladanan anak bangsa diajarkan.

Meski Kemerdekaan Indonesia telah menapaki usia 75 tahun, tetapi itu belum membuat tugas guru semakin mudah. Tugas guru hari ini justru semakin berat,

karena tantangannya lain dibanding pada masa-masa sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi membuat guru harus memutar otak untuk melakukan transfer ilmu kepada peserta didiknya.

Kemajuan iptek membutuhkan perhatian serius karena dunia pendidikan adalah sarana paling efektif dalam penyebaran iptek. Sistem pembelajaran konvensional perlahan mulai ditinggalkan karena saat ini proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga menggunakan media digital.

Sebagai aktor utama dalam menjalankan pendidikan, guru tidak boleh abai dalam menghadapi gelombang digital. Hari ini guru harus lebih pintar dan cerdas dibandingkan murid-muridnya dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, karena Guru yang melek teknologi akan mampu menanamkan daya kritis kepada murid untuk menjadi manusia revolusioner.

Saat ini guru dituntut tidak hanya menguasai dalam bidang pedagogik belaka, akan tetapi juga harus *update* dalam segala bidang. Guru menjadi tempat pedoman bagi murid untuk menguasai ilmu pengetahuan. Juga, harus selalu berupaya memotivasi dirinya untuk menguasai dunia teknologi.

Era digital berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Perubahan semakin cepat karena dunia menyatu dengan kemajuan teknologi informasi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, guru bukan lagi merupakan sosok yang berfungsi sebagai robot, tetapi merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi peserta ke arah kreativitas.

Komisi Internasional bagi Pendidikan abad ke-21 yang ditandai dengan era digital dibentuk oleh UNESCO melaporkan bahwa di era digital ini pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada empat pilar pendidikan. Pertama, *learning to know*, yaitu peserta didik belajar pengetahuan yang sesuai dengan jenjang



Amir Rifa'i

Pemerhati Pendidikan dan Pengajar AI-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
Universitas Muhammadiyah Malang

pendidikan yang diikuti. Kedua, *learning to do*, yaitu peserta didik mengembangkan keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan latihan (*law of practice*), sehingga terbentuk suatu keterampilan yang memungkinkan peserta didik memecahkan masalah dan tantangan kehidupan.

Ketiga, *learning to be*, yaitu peserta didik belajar menjadi individu yang utuh, memahami arti hidup dan tahu apa yang terbaik dan sebaiknya dilakukan, agar dapat hidup dengan baik. Keempat, *learning to live together*, yaitu peserta didik dapat memahami arti hidup dengan orang lain, dengan jalan saling menghormati, saling menghargai, serta memahami tentang adanya saling ketergantungan (*interdependency*).

Dengan panduan ke empat pilar tersebut, di era digitalisasi ini guru ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan dunia yang semakin canggih. Guru harus bisa menyesuaikan kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, dan kreatifitas peserta didik guna menjawab tantangan zaman.

Tantangan guru semakin besar dengan munculnya *platform* pendidikan virtual yang turut menggeser peran posisi guru di era ini. Bahkan, di beberapa sekolah dan universitas sudah lama menerapkan sistem belajar *online*, dimana tatap muka antara guru dan murid tidak lagi dibutuhkan seperti dahulu kala.

Belum lagi adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan guru untuk lebih menguasai dunia teknologi, dengan berbagai macam metode dan media pembelajaran yang harus dikuasai supaya tetap bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian, guru lah yang harus mengikuti perkembangan zaman dan menikmati proses bergesernya peran mereka di era ini. Guru harus memulai mengubah cara

mereka mengajar, meninggalkan cara-cara lamanya serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih cepat.

Oleh karenanya, semua elemen kompetensi guru yang cenderung memperlakukan peserta didik hanya berdasarkan pengalaman, kemampuan, pengetahuan dan sumber-sumber belajar yang dimiliki seorang guru, untuk mengukur potensi dan kemampuan peserta didik hanya dengan otak seorang guru, tidak relevan lagi di era sekarang.

Tetapi dalam era digital ini guru harus menerapkan konsep *student center learning* yang memperlakukan siswa sebagai pusat pembelajaran yang dapat belajar dimana saja, kapan saja, dari siapa saja, dan di mana saja. Dalam hal ini guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator yang menunjukkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, dan membuka kesempatan pada siswa untuk dapat belajar dari berbagai sumber pembelajaran digital di dunia global.

Meski demikian, profesi guru tetap tidak akan tergantikan walaupun perkembangan teknologi yang bertambah pesat setiap harinya. Setiap orang bisa menimba ilmu dari teknologi yang kini serba digital. Akan tetapi, peran guru tetap dibutuhkan karena tugas mereka tidak sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga menanamkan nilai-nilai kehidupan dan kebaikan, serta keteladanan yang tidak bisa dipelajari dari saluran informasi apapun.

Semoga dengan semangat HGN tahun ini para guru bisa menjadi pendidik yang bisa memanfaatkan segala perkembangan dunia digital dan melakukan transformasi dalam proses pembelajaran. Semoga sedikit tulisan ini menjadi refleksi kita semua pada HGN dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional.





TRUMP YANG SENGIT, BIDEN YANG TENANG



Achmad Santoso
Editor Bahasa Jawa Pos

Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020 memang telah usai dengan Joe Biden berhasil mengeliminasi Donald Trump dari Gedung Putih. Namun, tidak demikian cerita yang ditinggalkannya. Salah satunya impresi masing-masing dalam menghadapi pemilihan yang, di mata sejumlah warganet, seperti "de javu" pilpres Indonesia merujuk pada klaim kemenangan prematur yang sempat dilakukan calon petahana.

Meski sama-sama sudah berkepal tujuh, Trump 74 tahun dan Biden 77 tahun, karakter kedua figur boleh

dibilang amat bertolak belakang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Trump adalah tipe pemimpin yang temperamen, suka berkonfrontasi, dan berwatak sengit. Biden sebaliknya: cenderung kalem, tenang, dan hati-hati. Sebuah antitesis.

Lantas, apa menariknya jika ditinjau dari sudut pandang bahasa?

Tiap tokoh yang bertarung memperebutkan kekuasaan boleh punya gaya bahasa atau stilistika yang berbeda dalam mengekspresikan kehendak. Akan tetapi, tujuannya mereka sama: sama-sama ingin meraih simpati dari



Tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilu, Trump sudah menebar kampanye agresif yang cenderung negatif. "Mencuri" dan "bermain kotor" merupakan kiasan yang bernuansa buruk. Alih-alih menggunakan bersaing atau berkompetisi merebut pemerintahan, Trump memilih kata "mencuri" yang berarti menginginkan sesuatu dengan cara tidak sah. "Bermain kotor" setali tiga uang.

khalayak. Watak temperamen berbanding lurus dengan bahasa-bahasa yang sengit nan ofensif. Karakter kalem tampaknya juga satu frekuensi dengan gaya komunikasi yang santun.

Bahasa yang Sengit

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *sengit* dimaknai sebagai *tajam, keras, dan sangat menyakiti hati (tentang perkataan)* atau *pedas (tentang kata-kata)*. Segala unsur sifat di atas klop dengan gaya komunikasi Donald Trump di seputar pilpres AS.

Dalam sebuah kesempatan pertemuan Partai Republik, misalnya, Trump mengatakan bahwa sang lawan, Partai Demokrat, hendak memanipulasi pemilu yang digelar 3 November untuk menumbangkan dirinya. "Mereka mencoba mencuri pemerintahan ini. Satu-satunya cara adalah bermain kotor," ucap Trump kala itu (*Jawa Pos*,

20 Agustus 2020).

Tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilu, Trump sudah menebar kampanye agresif yang cenderung negatif. "Mencuri" dan "bermain kotor" merupakan kiasan yang bernuansa buruk. Alih-alih menggunakan bersaing atau berkompetisi merebut pemerintahan, Trump memilih kata "mencuri" yang berarti menginginkan sesuatu dengan cara tidak sah. "Bermain kotor" setali tiga uang.

Sebagaimana umumnya pemimpin petahana di mana pun berada, Trump juga tidak mau lengser begitu saja dari pucuk menara gading. Maka, segala upaya ditempuh, termasuk bermain-main dengan kampanye negatif, kalau tidak mau disebut hitam. Lihatlah narasi berita yang ditulis *Jawa Pos* dengan judul *Pilpres Belum Digelar; Trump Terang-terangan Tuding Demokrat Curang*.

"Presiden Amerika Serikat Donald Trump enggan turun takhta. Dia meyakini bahwa kubunya pasti menang pemilu. Jika sampai kalah, maka terjadi kecurangan besar. Salah satu sumber kecurangan, menurut Trump, adalah perolehan suara via pos, yang banyak dilakukan para pendukung Joe Biden."

Narasi itu menggambarkan bahwa Trump di satu sisi yakin dirinya akan memenangi palagan pilpres. Sementara di sisi lain, ia mengklaim yang terjadi adalah kecurangan jika sampai dirinya kalah.

"Anda tahu *kan* saya berulang-ulang mengeluhkan tentang balot (yang dikirim via pos, Red) dan balot-balot tersebut adalah bencana," tegas Trump kepada awak media seperti dikutip *Agence France-Presse* kala itu (23/9).

Setelah menggunakan frasa "mencuri" dan "bermain kotor", Trump juga memilih kata bernuansa

negatif lainnya, "bencana". Dari sini dapat dilihat, karakter temperamen, emosional, cenderung menggunakan kata-kata negatif karena aura yang timbul adalah aura kemarahan.

Kata-kata sengit sarat emosional itu pula, rupanya, yang menjadi salah satu *handicap* (hambatan) Ahok sehingga kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Ahok juga dikenal sebagai pribadi yang temperamen dan kerap mengobrol kata-kata ofensif yang cenderung kasar. *Merdeka.com* setidaknya merekam ada tiga kata-kata kasar Ahok yang dianggap kebablasan: "bajingan", "bego", dan "berengsek". Memang, bagi sebagian orang kata-kata tidaklah terlalu penting, tapi sejarah mencatat bahwa kata-kata mampu menggerakkan dan memengaruhi massa.

Bung Karno, barangkali, takkan berhasil memobilisasi dan menyatukan rakyat Indonesia seandainya saja tidak mampu menjadi orator ulung. Bahasa komando revolusinya terbukti ampuh memersuasi massa di akhir pidatonya.

"Muak" dan "para idiot" merupakan sebuah diksi agitasi. Penggunaan kata "idiot" bahkan sudah masuk isu rasis dan SARA sebagaimana ditulis Arifin dalam bukunya, Komunikasi Politik (2003). Melabeli seseorang dengan "idiot" termasuk upaya menyerang pihak lain secara personal.

Sebut saja "Kerjakan komandoku", "Indahkan perintah ini", atau "Jalankan perintah saya" (Dadang, 2020).

Ajining diri gumantung ana ing lathi, kata pepatah Jawa. Maka, menjaga tutur kata memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi bagi seorang pemimpin.

Tapi, Donald Trump bergeming. Dalam acara debat presiden pertama yang berlangsung pada 30 September lalu, Trump dan Biden terlibat saling serang. Misalnya, saat Trump melakukan pembelaan perihal penanganan pandemi Covid-19 yang disorot Joe Biden. "Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi saya katakan pada Anda, Joe, Anda tidak akan pernah bisa

melakukan pekerjaan yang kami lakukan. Anda tidak memiliki semangat kerja dalam darahmu."

Setelah mengklaim bahwa dirinya melakukan pekerjaan dengan baik, Trump lantas menyerang Biden dengan menganggap politikus Demokrat itu tidak bisa menyamai kinerja dirinya. Bahkan semangat kerja dalam darah pun tak ada, katanya. Memang jarang ada pemimpin yang mau dikritik. Bahkan, Jokowi yang dikenal sederhana dan merakyat pun sekarang mulai antikritik. Apalagi Trump yang memang demikian keras. Sudah tidak mau dikritik, mengkritik balik pula.

Seminggu lebih menjelang coblosan, Trump terus melakukan manuver



politik. Lagi-lagi, ia menggunakan istilah agresif, "serang". Serangan Trump tertuju kepada Kepala National Institute of Allergy and Infectious Diseases AS Anthony Fauci. Dalam percakapan telepon dengan staf kampanye, dia mengejek pakar virologi paling veteran di Negeri Paman Sam itu, "Orang-orang sudah muak dengan Fauci dan para idiot lainnya."

"Muak" dan "para idiot" merupakan sebuah diksi agitasi. Penggunaan kata "idiot" bahkan sudah masuk isu rasis dan SARA sebagaimana ditulis Arifin dalam bukunya, *Komunikasi Politik* (2003). Melabeli seseorang dengan "idiot" termasuk upaya menyerang pihak lain secara personal.

Puncaknya, begitu sang lawan memperoleh suara yang lebih banyak darinya, Trump langsung murka. Dia bilang pilpres sarat kecurangan. Dia juga sempat mengklaim kemenangan. "SAYA MENANG PEMILU INI," katanya via *Twitter*.

Bahasa yang Tenang

Jika dilihat sekilas, Joe Biden sebenarnya bukanlah tipe seseorang yang berwatak keras dan pemaarah seperti Trump. Ia punya cara sendiri untuk merebut simpati rakyat. Ia mengambil ceruk yang tidak dimiliki Trump. Dan ia memanfaatkan betul celah itu.

Kalaupun mengumbar amarah, saya pikir itu dalam rangka merespons aksi Trump. Misalnya, dalam berita *Debat Pilpres AS, Joe Biden-Trump Saling Hina* (*Jawa Pos*, 1 Oktober 2020).

"Diamlah, Bung," ujar Joe Biden, naik pitam. Sebab, sang lawan debat, calon petahana Donald Trump, terus menginterupsinya, tulis *Jawa Pos*. Dari situ dapat dilihat bahwa kemurkaan Biden muncul sebagai respons atas stimulus mitra tutur.

Perbedaan watak itu juga digambarkan *Jawa Pos* dalam satu kalimat berikut.

Soal tampak luar, Trump jelas menang. Setiap kali Biden bicara, Trump bakal menatap Biden dengan fokus dan bersiap untuk menyela lawan bicara. Sedangkan Biden jarang melihat wajah rivalnya. Dia memilih untuk menatap lurus ke kamera untuk mengajak bicara penonton.

Ketenangan, juga kehati-hatian, dalam berbahasa diperlihatkan Biden saat tahu suara di Pennsylvania berpihak kepadanya. "Hasilnya belum jelas, tapi kita akan memenangi pertarungan ini," kata Biden. Meskipun diklaim telah menang kala itu, Biden lebih memilih untuk sedikit bersabar. "Saya meminta agar semuanya bersikap tenang. Biarkan pemilih yang menentukan pemenang, bukan lainnya," lanjutnya.

Bahkan, ketika kemudian dinyatakan menang dan menyampaikan pidato kemenangan pun, ia masih berbicara dengan tenang, tidak emosional. "Bagi Anda yang memilih Presiden Trump, saya tahu Anda kecewa. Tapi, mari kita beri kesempatan ke satu sama lain," katanya.

Biden, rupanya, tidak suka memercikkan api permusuhan. Maka, kata-kata yang dipilih pun lebih "bijak": "Anda", "kecewa", "mari". Jika tidak tenang dan sangat emosional (bukan marah, tapi meledak-ledak), bisa saja ia akan mengungkapkan kalimat: "Kalian memang sepatutnya kalah. Kalau tidak suka saya, silakan pergi dari negara ini." Biden lebih memilih untuk merangkul ketimbang memukul.

"Tak ada yang tidak bisa kita lakukan jika bersatu," kata Biden di kesempatan lain. Biden memang lebih menginginkan tak ada konflik berkepanjangan sesuai pilpres. Makanya, ia berkali-kali memakai kata "bersatu". Soal nanti antikritik atau tidak lantaran semuanya ingin dirangkul, itu hal lain. Yang jelas, tiap pemimpin memiliki cara untuk mempertahankan hegemoni. Salah satunya "bermain-main" dengan bahasa. Sebab, kata Orwell, bahasa politik memang dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur.



IJTIHAD MUHAMMADIYAH MEREKONSILIASI KONSEP POLITIK MODERN

“Muhammadiyah Anugerah Allah bagi bangsa Indonesia, melalui kontribusi gerakan pencerahan Islam yang dirintis KH. Ahmad Dahlan“.

Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam sambutan *Resepsi Virtual Milad Muhammadiyah ke 103*, pada Rabu (18/11). Pernyataan yang lebih mirip sebagai pujian itu tidaklah berlebihan mengingat kontribusi Muhammadiyah yang begitu besar, bahkan sebelum negeri ini berdiri. Sektor pendidikan, sosial dan kesehatan, menjadi ladang garapan yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah. Di abad kedua usianya, Persyarikatan ini bergerak pada sejumlah problem kontemporer, misalnya, dengan melakukan Jihad Konstitusi dan pendirian Muhammadiyah Covid Crisis Center (MCCC).

Hal tersebut sebagai ijtihad Muhammadiyah dalam keikutsertaannya menyelesaikan persoalan keummatan dan kebangsaan. Muhammadiyah selalu mencoba menawarkan solusi pada setiap permasalahan kenegaraan, sebagai contoh penanggulangan pandemic covid-19, Muhammadiyah membentuk MCCC.

Melalui MCCC, Muhammadiyah menginstruksikan pada seluruh lembaga pendidikan yang dikelolanya untuk mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan

Belajar dari Rumah. Segala kebijakan Muhammadiyah selalu bersinergi dengan pemerintah. Namun di sisi lain, Muhammadiyah juga kritis pada berbagai kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan cita-cita ideal bangsa ini.

Berbagai usaha Muhammadiyah tersebut tentu dalam porsinya, misalnya, dalam penolakan UU Cipta Kerja, Muhammadiyah jelas menginstruksikan untuk melakukan *Judicial Review* dengan “Fikih Judicial Review” yang diungkapkan Sekretaris umumnya, Abdul Mu’ti.

Dalam mengkritisi kebijakan lain dan mengawal pembentukan peraturan perundang-undangan, Muhammadiyah pintar memainkan porsinya. Berbagai upaya inilah yang disebut dengan Ijtihad Kontemporer atau Jihad Konstitusi Muhammadiyah. Salah satu peneliti Muda Muhammadiyah Hasnan Bachtiar memaparkan dengan runut dan jelas, kemana arah gerak Muhammadiyah di abad kedua, terutama dalam memposisikan diri sebagai organisasi Islam terbesar.

Dalam buku yang berjudul *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-Ahd wa al-Shadahah sebagai Siyar dan Pancasila*, Hasnan mengkaji berbagai dokumen resmi Muhammadiyah, karya-karya akademik, serta wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Dia menemukan fakta bahwa Muhammadiyah sebenarnya mengkonseptualisasikan gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar al-Ahd wa al-Shadahah* sebagai suatu rekonsiliasi intelektual antara Pancasila (ideologi Negara) dan doktrin siyar. Gagasan ini dihasilkan berdasarkan pada basis pemikiran yang fundamental, yakni Islam berkemajuan. Menurut penulis, Islam

harus dipandang secara progresif sebagai agama yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Segala upaya dalam proses penyelesaian masalah menurut perspektif Muhammadiyah adalah ijtihad.

Cara Muhammadiyah dalam berijtihad adalah dengan menteologisasikan demokrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun demokrasi sebagai sebuah paradigma yang dibangun melalui pemahaman dan penafsiran teologis akan Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai seperti *shura* (keadulatan rakyat atau musyawarah), *'adalah* (keadilan), dan lain sebagainya. Jalan inilah yang bisa menjamin masa depan hubungan antar-umat beragama yang baik dan sebagai teladan bagi dinamisasi hukum Islam di dunia.

Muhammadiyah mempertimbangkan bahwa upaya teologisasi demokrasi memiliki dua jalan yang menjembatani antara gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar al-Ahd wa al-Syahadah* dengan pandangan Muhammadiyah terhadap demokrasi. Jalan yang pertama adalah "objektifikasi" serta jalan yang kedua adalah substansialisasi dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai demokrasi.

Secara politis, Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai manifestasi dari sekularisasi sistem politik, terutama sejak dasar negara tersebut dipandang bukanlah sebagai konsep islamisme dan bukan pula anti agama (*anti-faith*). Maka dari itu, Muhammadiyah beserta segala pemikirannya menjembatani nilai-nilai esensial syariah (*maqasid*) dengan sistem politik demokrasi yang modern. Dengan kata lain, pancasila itu sendiri secara inhern bersifat Islami karea konseptualisasinya dan pemahamnya berdasarkan pada nilai-nilai Islami.



Dar al-Ahd wa al-Syahadah bermakna Indonesia adalah negara konsensus dan persaksian. Disebut konsensus karena disepakati oleh representasi para tokoh bangsa, sementara disebut persaksian, karena mendorong kaum Muslim bersama-sama turut serta dalam proses pembangunan bangsa dan menyaksikan segala kemajuan yang diraih.

Buku Hasnan yang bermula dari sebuah tesis magisternya di Centre for Arab and Islamic Studies (CAIS) Middle East and Central Asia, ANU College of Arts and Social Sciences (CASS) the Australian National University (ANU), Canberra Australia tersebut membahas mengenai konsep siyar yang dibangun dan dikembangkan oleh Muhammadiyah, khususnya

Islam harus dipandang secara progresif sebagai agama yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Segala upaya dalam proses penyelesaian masalah menurut perspektif Muhammadiyah adalah ijtihad

dalam konteks kehidupan Negara-bangsa.

Pada 2015, Muhammadiyah memproklamkan gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar al-'Ahd wa al-Shadahah* yang maknanya adalah Negara Indonesia mesti dipandang sebagai negara kesepakatan atau konsensus dan persaksian. Syiar adalah salah satu disiplin dalam hukum Islam yang mencakup masalah hukum perang dan hubungan internasional.

Hasnan mencoba menggenapi kekosongan dalam kajian spesifik; *Pertama*, disiplin ilmu syiar yang dibangun di dalam tradisi Arab-Islam, tidak menjangkau pelbagai perkembangannya di Asia-Tenggara, khususnya di Indonesia, sebuah negara non-Arab dengan populasi muslim terbesar di dunia. *Kedua*, karya-karya akademik yang secara khusus membicarakan Muhammadiyah, terutama yang diproduksi oleh pelbagai universitas di Barat (Amerika, Eropa dan Australia), tidak mendiskusikan masalah pandangan syiar menurut Muhammadiyah.

Ketiga, kajian-kajian yang memberikan perhatian kepada masalah *syiar* belum menyentuh sama sekali masalah politik Indonesia kontemporer padahal Muhammadiyah berperan sangat penting mengenai masalah tersebut.

Buku ini disajikan dalam lima bagian. Bagian *pertama* adalah pendahuluan, dalam bagian ini, Hasnan mendudukan pembaca pada persoalan dasar dengan mengawali sebuah pertanyaan serta mengajukan argumentasi awal. Pada bagian kedua mendalami apa dan bagaimana teori hukum perang dan hubungan internasional dalam tradisi Islam. Bagian ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis disiplin syiar, yang mencakup syiar di dalam berbagai tradisi Islam, syiar dan dinamisasi hukum derta syiar dalam konteks Negara-bangsa dan globalisasi.

Bagian *ketiga*, mendiskusikan konsep Dar al-'Ahd wa al-Shadahah sebagai buah pikiran Muhammadiyah mengenai Pancasila. Bagian ini mendalami bagaimana

Secara politis, Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai manifestasi dari sekularisasi sistem politik, terutama sejak dasar negara tersebut dipandang bukanlah sebagai konsep islamisme dan bukan pula anti agama (anti-faith). Maka dari itu, Muhammadiyah beserta segala pemikirannya menjembatani nilai-nilai esensial syariah (maqasid) dengan sistem politik demokrasi yang modern. Dengan kata lain, pancasila itu sendiri secara inheren bersifat islami karena konseptualisasinya dan pemahamannya berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

pemahaman Muhammadiyah terhadap rekonsiliasi intelektual antara pancasila dan doktrin-doktrin *syiar*.

Bagian *keempat* mengelaborasi hubungan antara Dar al-'Ahd wa al-Shadahah dengan pandangan Muhammadiyah mengenai demokrasi Indonesia. bagian ini akan mengevaluasi bagaimana gagasan Muhammadiyah tersebut sebagai sebuah manifestasi dari ijtihad kontemporernya berkontribusi bagi pemikiran Muhammadiyah mengenai demokrasi di Indonesia, bagian kelima adalah ikhtitam dari buku ini, menyoroti temuan-temuan yang signifikan dari kajian yang dilakukan dan juga sebuah tawaran berupa refleksi konseptual.

Di bagian akhir, Hasnan menutup dengan kesimpulan bahwa pencapaian Muhammadiyah sangat mungkin dipertimbangkan sebagai teladan mengenai kebangkitan reformasi hukum Islam bagi Negara-negara muslim lainnya. Hasnan menentang pendapat Wael Hallaq, bahwa Negara Islam tidak mungkin mengadopsi dan mempraktikkan sistem Negara modern. Menurut Hasnan, gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahd wa al-Syadahah merupakan usulan menarik sebagai upaya merekonsiliasi pemahaman Islam dan konsep politik modern.

Muhammadiyah tidak sendirian dalam mengusung konsep ini, para intelektual Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahida dan Ahmad Syafii Maarif menegaskan pendapat yang selaras dengan Muhammadiyah.

Judul Buku :

Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah:

Dar al-'Ahd wa al-Shadahah sebagai Syiar dan Pancasila

Penulis : Hasnan Bachtiar

Penerbit : Suara Muhammadiyah

Cetakan/Tahun: I/ November 2020

Peresensi:

Imroatus Sholihah

Staf Laboratorium Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Kisah Pulu Sang Bidadari

Konon katanya, sepasang saudara kembar dianugerahi ikatan batin yang lebih kuat dibanding saudara lainnya. Jika yang satu sakit, yang lainnya merasakan hal yang sama. Kalau yang satu berada dalam bahaya, yang satunya juga merasakan kegelisahan yang sama.

Buku yang ditulis oleh Asma Nadia ini berkisah tentang si kembar Bidadari Ayuning dan Bidadari Ayuni. Ayuni, sang adik memiliki kulit putih bersih, selalu iba terhadap orang lain, dan suaranya juga bagus. Sedangkan Ning, sang kakak, tidak terlalu memikirkan penampilan, namun wajahnya manis dan kulitnya agak lebih gelap. Juga cerdas, sifat pemberaninya sangat menonjol, bicarannya tegas, runtut, dan apa adanya. Keduanya sangat senang melantunkan tembang.

Seperti halnya sejumlah karya Nadia

sebelumnya, Novel dengan ketebalan 301 halaman ini juga sangat rapi dan ritmis. Sang penulis Asma Nadia mengenalkan tokoh-tokohnya dengan mendetail dan penuh dramatis, sehingga berbagai keputusan yang diambil si tokoh di kemudian hari terasa masuk akal. Motivasi-motivasi tokohnya jelas. Seperti mengapa Ayuni bersikeras ingin kerja di Jakarta, atau kenapa Nyonya Lili bisa sekejam itu, atau bagaimana cara Ayuning mengungkap misteri kematian adiknya, Ayuni.

Seperti biasa Asma Nadia selalu mampu menyajikan sebuah cerita yang tidak komersil, meski tema yang diusung ada kemiripan dengan novelnya yang berjudul “Pesantren Impian” yang ada sedikit unsur misteri. Namun secara eksekusi jelas beda. Dalam kata pengantar dari buku, penulis novel ini menjelaskan bahwa karya ini hadir karena terinspirasi dari peristiwa nyata di Surabaya yang pernah menjadi *headline* dalam sebuah koran.

Ning dan Ayuni adalah sepasang kembar identik yang hanya berjarak beberapa menit. Meski tak terlalu serupa, tapi wajah mereka sangat mirip. Ning dan Ayuni selalu kompak satu sama lain, apalagi sejak peristiwa yang menewaskan ayah dan kakak laki-laki mereka.

Sebagai kakak (menurut orang zaman

Tekad yang luar biasa Ayuni juga muncul ketika dia mempunyai cita-cita memberangkatkan ibunya berhaji dan membantu meringankan beban Ning kakaknya. Hal itu yang memaksa dirinya untuk berangkat ke Jakarta untuk bekerja, walau ibu dan Ayuning melarangnya

dahulu, kembar yang lahir belakangan yang sebenarnya adalah kakak), Ning telah berkorban banyak hal. Ia mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga untuk ibu dan adiknya. Roda kehidupan terus berputar dan memaksa Ning untuk membantu ibunya membuka warung nasi semenjak meninggalnya bapak dan kakaknya, Mas Wisnu karena tertabrak kereta api.

Tekad yang luar biasa Ayuni juga muncul ketika dia mempunyai cita-cita memberangkatkan ibunya berhaji dan membantu meringankan beban Ning kakaknya. Hal itu yang memaksa dirinya untuk berangkat ke Jakarta untuk bekerja, walau ibu dan Ayuning melarangnya.

Sampai di Jakarta, Ayuni bekerja sebagai seorang pengasuh anak (*baby sister*) sekaligus pembantu rumah tangga di rumah besar nan megah milik Nyonya Lily. Dari sinilah drama dalam Novel Asma Nadia dimulai. Di rumah besar itu, setiap hari selalu ada gejolak amarah, teriakan, bentakan, serta penyiksaan yang bertubi-tubi sampai pada terjadinya pembunuhan.

Penyiksaan selalu Ayuni alami setiap harinya, padahal hanya karena kesalahan kecil, seperti lambat datang jika dipanggil, disertai bentakan, jambakan rambut, bahkan dikurung dengan tidak

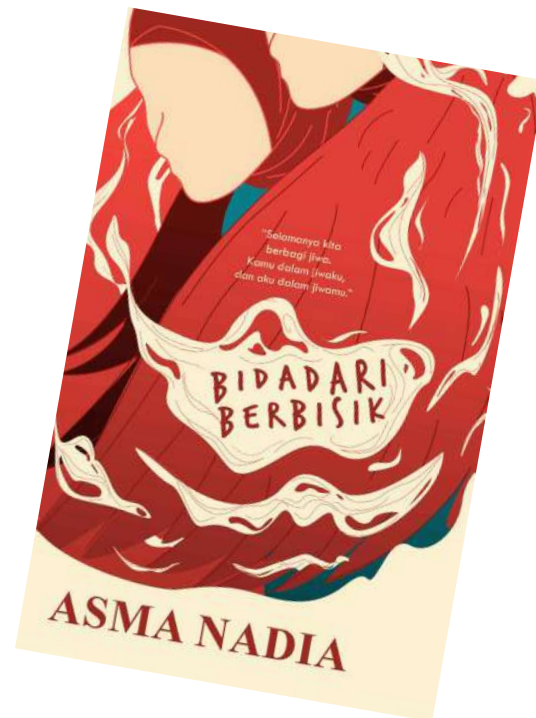
diberi sesuap nasi di gudang. Begitu pula yang dialami teman sepekerjaanya: Onah, Wati, dan Mak Lin. Namun yang paling sering jadi sasaran penyiksaan yang dilakukan oleh Nyonya Lily adalah Ayuni. Dan seorang rekan kerja yaitu Mak Lin yang selalu membelanya dan memberinya semangat saat Ayuni merasa sedih dan kerinduan kepada keluarganya mulai tak terbendung lagi.

Suatu hari, Ayuni dituduh mencuri empat biji rambutan oleh keluarga Nyonya Lily, Meski yang dituduhkan kepadanya adalah hal sepele, namun kemarahan Nyonya Lily tak terkirakan. Ia disiksa tanpa ampun. Semakin ia merintih kesakitan, Nyonya Lily semakin kalap dibuatnya. Mak Lin yang membelanya juga ikut disiksa, bahkan karena sudah tidak kuat lagi, Mak Lin pergi dari rumah itu dan mengundurkan diri. Pengunduran diri Mak Lin malah membuat Nyonya Lily semakin gencar menyiksa dengan sangat tidak manusiawi, seperti mencekoki kotoran anjing ke dalam mulut Ayuni. Hanya kata lirih *Allah, Allah, Allah* yang dilantunkan Ayuni dengan semakin lirih.

Kenangan bersama ibu, Mbak Ning, teman desanya, dan Rahman terekam jelas dalam ingatan Ayuni. Sejurus kemudian, sebuah jeratan di leher membuatnya sulit bernapas, lambat laun menghilangkan kesadaran gadis itu dan membuatnya tak lagi bisa berkumpul bersama keluarga dan melihat dunia.

Sementara itu, di malam yang sama, Ning merasakan pernapasannya tercekik. Sekujur tubuhnya membiru, lemas seperti kehilangan sumber energinya, seakan merasakan siksaan Ayuni yang telah pergi untuk selamanya. Begitu pula yang ibu rasakan. Apalagi ibunya memang sudah sakit-sakitan, dan diperburuk dengan kabar tentang Ayuni yang disiksa oleh majikannya.

Novel ini cocok untuk segala kalangan. Meskipun di dalamnya tidak dijelaskan genre dari novel ini, tapi kisahnya seputar keluarga dan misteri yang terjadi pada Ayuni serta pengungkapan kematiannya cukup membuat bulu kuduk berdiri. Sekedar informasi, novel ini sama sekali tidak mengandung romantisme



Ibunya sudah tidak kuat lagi dan meninggal dalam kerinduan pada bidadarinya yang tak tertuntaskan itu. Perih kedukaan tiada tara dirasakan Ning. Terngiang pembicaraannya dengan sang adik, “Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya, kalau mau dapat ganjaran surga, harus sabar ya, Mbak!”

Semangat dan tekad yang besar untuk mencari Ayuni adiknya membuat Ning berangkat juga ke Jakarta. Seolah Tuhan memberi petunjuk-Nya, ia mendapat pekerjaan di tempat Ayuni dibunuh. Dan ditempat itulah Ning mulai menjalankan tugasnya sebagai layaknya pembantu sembari merencanakan misi untuk mengungkap misteri kematian adiknya.

Novel ini cocok untuk segala kalangan. Meskipun di dalamnya tidak dijelaskan genre dari novel ini tapi kisahnya seputar keluarga dan misteri yang terjadi pada Ayuni serta pengungkapan kematiannya cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dan sekedar informasi sama sekali tidak mengandung romance.

Namun setiap karya tentu ada kritik dan saran, menurut peresensi yang agak disayangkan adalah dalam blurb di belakang buku yang menceritakan terlalu banyak poin dalam alur cerita. Alangkah baiknya jika beberapa hal disimpan dan tidak

perlu disampaikan dalam blurb belakang buku sebagai kejutan bagi para pembaca, yang baru akan diketahui oleh pembaca setelah menyelesaikan bacaan bukunya secara keseluruhan, itu lebih menarik.

Akhirnya, apakah yang ingin dilakukan oleh Ning di rumah besar Nyonya Lily? Apakah ingin membalas dendam, atau hanya ingin mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Nyonya Lily? Simak keseluruhan dalam buku karya Asma Nadia ini.

Judul	: Bidadari Berbisik
Penulis	: Asma Nadia
ISBN	: 9786237458494
Penerbit	: Republika
Tahun terbit	: 2020 (cet. 1)
Tebal	: vii + 301 halaman
Peresensi	: Amir Rifa'i, Penikmat Novel dan Staf Pengajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) Universitas Muhammadiyah Malang



MENGHIDUPKAN KESENIAN BANTENGAN

Dede Athallah Fadhil

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Malang

Kota Malang tidak hanya terkenal dengan pariwisata hiburan dan kuliner, tetapi juga salah satu destinasi seni yang menjanjikan di Indonesia. Kota terbesar kedua di Jawa Timur ini rupanya juga memiliki segudang budaya yang unik dan menarik, salah satunya adalah kesenian Bantengan. Kesenian ini memiliki ciri khas yang tak didapat dari jenis kesenian

lainnya, khususnya di Jawa Timur.

Kesenian Bantengan berkempong pesat pada 1960-an, tepat pemerintahan sedang dipimpin Orde Lama (1945-1965). Setiap perayaan atau pawai Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menampilkan kesenian tersebut. Namun seiring dengan kemunduran ekonomi pada masa itu, Bantengan mengalami kelusuhan.

Pada 15 tahun terakhir, kesenian ini mulai menggeliat kembali bahkan menjamur di hampir setiap kecamatan di wilayah Kabupaten maupun Kota Malang. Di setiap kecamatan, rata-rata terdapat 3-5 perkumpulan seni Bantengan, terutama di sekitar Kecamatan Tumpang, Poncokusumo dan Kota Batu.

Bantengan sendiri adalah kesenian pertunjukan yang memadukan gerakan tari, olah kanuragan, serta atraksi dari dua orang yang menyerupai seekor Banteng. Dalam setiap pertunjukan Bantengan menampilkan sepasang banteng, jantan dan betina serta tokoh lain seperti harimau, monyet, serta *caplokan*. Salah satu keunikan dan ketegangan saat melihat pertunjukan ini ialah para pemain Bantengan mengalami peristiwa kesurupan. Para pemainnya rata-rata adalah laki-laki baik berusia remaja maupun usia dewasa.

Dalam kelompok ini, atribut dan properti pagelaran seperti kepala dan ekor Banteng diproduksi sendiri. Pembuatan kepala Bantengan tidak sama dengan pembuatan kerajinan lainnya, karena membutuhkan perlakuan khusus dalam penciptaanya.

Pada pembuatan kepala Banteng, misalnya, terdapat ritual yang harus dilakukan yaitu dengan membakar dupa. Bahan pembuatan atribut kepala Bantengan adalah kayu dadap cangkring, pines, kares, dan tali tampar. Sedangkan bahan utama pembuatan badan Banteng adalah rotan yang dibentuk rangka badan dengan lebar kurang lebih sekitar 70 cm dan panjang 2 meter. Pada saat pagelaran, rangka tersebut akan ditutupi kain hitam dengan panjang sekitar sepuluh meter.



Seluruh perlengkapan yang ada disimpan dan dirawat dengan baik oleh sang pawang banteng. Dalam perawatannya, atribut tersebut akan diberi *sesajen* secara rutin di setiap Jumat *legi*.

Sesajen juga dipersiapkan tidak hanya ketika menyimpan kepala Banteng, namun juga saat pagelaran yang bertujuan untuk keselamatan semua orang. Selain itu, dalam kesenian ini juga terdapat pantang yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Pantangan tersebut terdiri dari tidak boleh mengonsumsi minuman keras dan kacang, bahkan bagi pemain laki-laki tidak diperkenankan memiliki rasa suka kepada perempuan.

Dalam pelaksanaannya, kesenian Bantengan selalu diiringi oleh sekelompok orang yang memainkan musik khas Bantengan dengan menggunakan alat musik berupa gong, kendang, dan lainnya. Kesenian ini dimainkan oleh dua orang laki-laki sebagai kepala dan ekornya, dan hampir di setiap pertunjukan pemain depan akan mengalami peristiwa kesurupan sehingga orang di belakangnya akan berusaha

mengikuti di setiap gerakannya.

Pertunjukan semakin menarik dengan keberadaan dua Macanan, menyerupai hewan Macan, yang dibawakan oleh dua orang laki-laki dengan berkostum layaknya seekor harimau. Meskipun keberadaannya cenderung berfungsi sebagai pembantu banteng yang kesurupan atau menahannya ketika sudah tidak terkendali. Tidak jarang pula Macanan juga ikut kerasukan. Ketika keadaan sudah tidak terkendali maka hadirilah seorang pamong yang memimpin dan membawa kendali berupa cambuk.

Secara garis besar Bantengan ini merupakan campuran dari seni tari dan pencak silat. Menurut seniman asal Malang Agus Riyanto, kesenian ini bertujuan untuk merekrut para pemuda untuk mempelajari ilmu *Kanuragan*. Dia mengatakan, Bantengan memiliki banyak filosofi yang menyertai kesenian tersebut, di antaranya banteng menggambarkan kerakyatan, kebijaksanaan dan kesederhanaan. Sedangkan macan menggambarkan angkara murka, dan monyet sebagai iri dengki, kikir yang selalu mengadu domba kebijaksanaan dan angkara murka.

EPSON RILIS PRINTER LABELWORKS Z5000



Seperti tidak pernah berhenti, Epson kembali merilis produk terbaru dengan seri Epson LabelWorks atau LW Z5000 atau LW-Z5000WA dengan warna putih dan LW-Z5010BA dengan warna hitam. Dua printer pembuat label industri multiguna dan ekonomis baru ini sangat cocok digunakan di berbagai industri dan aplikasi di zaman sekarang.

Printer dengan seri LW Z5000 dapat mencetak label di berbagai macam bahan seperti polyethylene terephthalate (PET), vinyl, heat shrink tube (HST) serta magnetic tape, sehingga cocok untuk memproduksi label bagi semua jenis aplikasi yang dapat digunakan di dalam atau luar ruangan. Printer ini mampu mencetak label lebar dengan rentang mulai dari 6mm hingga 50mm, seri LW-Z5000WA dan LW-Z5010BA mampu menghasilkan label berkualitas tinggi yang tahan terhadap lingkungan industri dan manufaktur yang keras.

LW Z5000 didesain khusus bagi industri yang membutuhkan pencetakan dengan volume tinggi, menawarkan resolusi cetak 300dpi dengan kecepatan cetak luar biasa yaitu hingga 50 mm / detik, memudahkan pengguna untuk membuat label dengan percaya diri, cepat dan mudah.

Dengan bahan habis pakai yang mudah diganti, desain kit gulungan label BR sederhana, dan panel sentuh

LCD berwarna 4,3 “WQVGA dan keyboard, seri Z5000 menawarkan pengaturan dan pengeditan label yang mudah, serta pengalaman pengoperasian yang lebih mudah dan lancar sehingga dapat meminimalkan waktu henti produksi.

Printer dengan label LW-Z5000WA dan LW-Z5010BA memungkinkan pengguna untuk menikmati total biaya kepemilikan yang lebih rendah setelah menggunakan 2 buah kit gulungan label BR versus kartrid label. Biaya per cetak berkurang dengan penghematan hingga 50% dibandingkan dengan kartrid label, dan hingga 80% dibandingkan dengan penawaran gulungan / pita label transfer termal yang bersaing.

Seri LW-Z5000WA dan LW-Z5010BA kompatibel dengan semua kartrid label Epson LK dan kit gulungan label BR baru yang tahan lama dan telah lulus pengujian pihak ketiga untuk perekat yang kuat, kelembaban, air, suhu, bahan kimia, dan anti gores untuk mengatasi tuntutan pencetakan label yang menantang sekaligus memberikan ketenangan bagi pengguna.

Seri Z5000 juga mendukung konektivitas Wi-Fi dan Ethernet, memungkinkan bisnis menyiapkan satu printer untuk seluruh grup kerja dan mencetak dari mana saja saat terhubung ke jaringan yang sama. Pengguna juga dapat mencetak berbagai label industry, termasuk yang



memerlukan barcode, kode QR, pengkodean alfa dan numerik berurutan melalui perangkat lunak Epson Label Editor, Epson iLabel dan aplikasi seluler Epson Datacom, tentu ini membuat pencetakan label yang lebih hemat biaya.

Seri LW-Z5000WA dan LW-Z5010BA juga menawarkan peningkatan produktivitas dengan unit rewinder label otomatis serta pemotong penuh dan setengah, sebagai opsi untuk memungkinkan pengguna mencetak dan mengupas label dengan mudah.

Acer Swift 3X Intel Core Gen 11 Mulai diperkenalkan

Beberapa waktu lalu, Acer Acer memboyong laptop terbarunya ke Indonesia, yaitu Swift 3X yang pertama diperkenalkan ke publik secara global.

Laptop ini diklaim sebagai laptop tipis dan ringan pertama yang memakai chip grafis Intel Iris Xe Max dan dipadukan dengan prosesor Intel Core generasi ke-11, yang disebut bisa menghadirkan performa grafis setara laptop gaming.

Swift 3X menggabungkan kebutuhan pengguna akan sebuah laptop yang ringan namun juga memiliki performa kinerja terbaik di kelasnya berkat dukungan Intel Core Generasi ke-11 plus grafis diskrit Intel Iris Xe MAX

Meski menawarkan spek yang tinggi, bobot Swift 3X ini relatif ringan. Yaitu 1,3kg. Acer menyebut laptop ini cocok untuk para pekerja kreatif, streamer, dan YouTuber yang membutuhkan mobilitas. Tentunya juga fotografer yang membutuhkan perangkat dengan performa grafis mumpuni.

Selain itu, kipas pendinginnya diklaim 60% lebih baik dibanding sebelumnya, dengan kecepatan kipas yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Pendinginnya sendiri mengandalkan pipa pendingin ganda untuk pembuangan panas yang lebih efektif.

Sedangkan layar Swift 3X berukuran 14 inch 1080p dengan panel IPS dan cakupan warna 72% NTSC. Ada dua slot SSD yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang membutuhkan storage besar di laptopnya. Adapun baterainya sendiri diklaim bisa bertahan sampai 16 jam, dan mendukung fitur fast charging yang dalam waktu 30 menit pengisian bisa bertahan sampai 4 jam.

Acer memasarkan Swift 3X (SF314-510G) di Indonesia lewat masa pemesanan online di Acer eStore dan JD.ID dengan harga mulai RP 13,5 juta. Dalam paket penjualannya juga sudah disertakan Office Home & Student 2019. **Amir**



Mariah Carey

KOLABORASI BARENG ARIANA GRANDE UNTUK ACARA NATAL

Penyanyi solo wanita Mariah Carey mengajak kolaborasi dua penyanyi wanita lainnya, yaitu Ariana Grande dan Jennifer Hudson untuk acara spesial Natal yang akan datang di Apple TV+ tahun ini.

Dilansir Entertainment Weekly, Jumat, acara bertajuk “Mariah Carey Magical Christmas Special” akan menampilkan ketiga diva menyanyikan lagu versi remix dari single Carey, “Oh Santa!” (2010), bersama dengan video musik yang menyertainya.

Single itu akan dimasukkan ke dalam album soundtrack pendamping untuk proyek tersebut,

yang akan dirilis pada hari yang sama dengan acara spesial Apple TV+.

Selain Grande dan Hudson, “Mariah Carey Magical Christmas Special” juga menampilkan penampilan lainnya oleh Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland, Mykal-Michelle Harris, dan saudara kembar Carey, Moroccan dan Monroe.

Plot spesial ini mengikuti Carey yang diminta Santa untuk memeriahkan semangat Natal melalui pertunjukan musik yang diwarnai dengan tarian live dan rangkaian animasi yang inovatif.

Produser eksekutif Roman Coppola akan ikut serta dalam proyek ini, dipimpin dengan naskah yang ditulis oleh Caroline Fox.

Selain “Mariah Carey Magical Christmas Special”, penyanyi “All I Want for Christmas Is You” akan mengambil alih Apple Music Hits - stasiun radio baru Apple Music - untuk “liburan enam jam hits spesial” di Hari Natal.

“Mariah Carey Magical Christmas Special” tayang perdana Jumat, 4 Desember di Apple TV+.

Putra Dinanti

Luna Maya

TIGA ATURAN PERNIKAHAN ALA LUNA MAYA

Belakangan ini Luna Maya menutup rapat kehidupan pribadinya. Meski demikian, Luna Maya tak menampik keinginan berumah tangga dengan pasangan yang tepat.

Andai nanti berumah tangga, Luna Maya berkeyakinan bahwa pernikahan bukan tujuan akhir melainkan episode baru. Pernikahan, kata Luna Maya, pintu gerbang kehidupan.

Karenanya, Luna Maya berharap pernikahan tak membuatnya terbelenggu oleh pasangan. Bintang sinetron *Anggun* dan *Nada Cinta* tersebut berencana melakukan sejumlah adaptasi dengan pasangan.

“Banyak yang berpikir menikah itu adalah *way out* dan tujuan akhir dalam kehidupan. Padahal, bukan *guys*. Itu gerbang kehidupan yang sesungguhnya, yang kalian buka,” Luna Maya berpendapat.

Dengan orangtua saja, bintang film *Suzzanna Bernapas Dalam Kubur* dan *Sabrina* kadang beda pendapat apalagi sama orang lain yang kini jadi pasangan. Luna Maya menegaskan, ia pribadi yang merdeka.

“Enggak ada (aturan rumah tangga khusus), karena begini gue adalah individu, 100 persen individu yang merdeka. Gue adalah milik gue sendiri bukan milik pasangan begitu pula sebaliknya,” beri tahunya.

“Jadi, yang penting menghargai, toleransi, dan pengertian saja,” Luna Maya mebahasakan. Dalam kesempatan itu, pelantun “Suara Ku Berharap” menarik hikmah dari belum menikah di usia kepala tiga.

Setidaknya ada dua hikmah yang dipetik Luna Maya. Pertama, ia lebih punya waktu untuk mengembangkan kontrol diri sendiri seiring dengan bertambahnya pengalaman hidup.

Kedua, aktris kelahiran Denpasar, 26 Agustus 1983, ini



punya waktu untuk mendengar pengalaman teman dan keluarga perihal rumah tangga. Ini bisa dijadikan referensi ke depan.

“Ternyata persamaannya dalam pernikahan kurang lebih sama saja. Emosi dan ego. Karena waktu kita masih muda pengalaman enggak banyak, itu harus kita akui,” ia menyimpulkan.

Luna Maya berharap waktu persiapan yang lebih panjang membuatnya makin dewasa mengarungi rumah tangga kelak. “Semakin tua, kedewasaan itu hanya akan diasah dengan bertambahnya usia dan pengalaman,” pungkasnya.

VAKSINOMIC ILUSI KEBANGKITAN EKONOMI

Vaksin beberapa bulan ini menjadi resep kesehatan jempolan bagi keberlangsungan hidup di dunia. Betapa tidak, perkembangan Covid 19 telah meluluhlantakan kondisi sosial, ekonomi dan tatanan negara. Sayangnya, penyebaran Covid 19 tidak dibarengi dengan semangat penemuan vaksin sebagai obat penenang bagi keberlangsungan hidup.

Beberapa penanganan lebih mengarah pada prosesnya saja, bahkan hanya proses penghindaran dengan tidak melakukan kegiatan berkerumun.

Perlu adanya rencana serius untuk mengembalikan kondisi normal dengan menebarkan vaksin sesuai dosis yang diperlukan. Langkah penanganan pandemi yang terjadi selama 8 bulan ini belum memberikan dampak positif akan keberlangsungan hidup khalayak ramai. Padahal vaksin menjadi salah satu cara bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Agar perekonomian kembali menggeliat, perlunya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pasar dalam mengoptimalkan proses pemulihan ekonomi. Kepercayaan yang tinggi dapat terlihat dari *effect* gabungan antara vaksin, kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Kepercayaan ini akan terus surut dan meningkat bila pemerintah tidak cepat mendistribusikan vaksin secara merata. Bila vaksin terdistribusi ke seluruh wilayah yang berdampak pandemi. Harapan akan kepercayaan bagi lingkaran ekonomi produktif semakin tinggi sehingga ekonomi nasional semakin menggeliat.

Kepercayaan diri masyarakat ini akan tertuang sesuai harapan pemerintah, bila Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PES) bekerja berdasarkan status kebutuhan zona pandemi. Maka, efisiensi dan pemerataan distribusi vaksin akan teratasi.

Perlu keseriusan dalam percepatan pendistribusian vaksin dalam lini masa hingga kuartal IV/2021. Sesuai rantai percepatan distribusi perlu dosis pandemi sekitar

239 juta yang disebar. Tidak hanya itu, perlu penambahan distribusi vaksin ke seluruh Indonesia sebagai instrumen kepercayaan masyarakat akan keseriusan negara dalam memenuhi perlindungan kesehatan. Pendistribusian vaksin semisal Sinovas dan vaksin buatan dalam negeri, Merah Putih. Perlu apresiasi dari kalangan kedokteran agar vaksin pertama ini secara merata masuk Indonesia yang dijadualkan awal Desember.

Meskipun total jumlah 30-40 juta vaksin akan terdistribusi pada tahun ini. Kehadiran vaksin tersebut diyakini memberikan sisi positif bagi pasar dalam meningkatkan daya beli dan pasok produksi. Penanggulan ini memberikan efek domino bagi membaiknya pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot bahkan minus. Sesuai Data BPS yang tersedia sekitar 1,9 juta UMKM wajib melakukan revolusi digital menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jumlah ini setara 98 persen dari target tambahan 2 juta UMKM yang *onboarding* sampai akhir tahun. Revolusi digital bagi UMKM tidak bisa ditawar lagi dimasa pandemik ini.

Pendistribusian vaksin yang akan dilakukan tidak menyurutkan semangat transformasi digital bagi UMKM dalam memasarkan produk secara daring. Perlunya reformasi digital sebagai model baru dalam meneropong timbulnya transformasi dalam segala aspek kehidupan. Model baru transformasi sosial ekonomi ini sebagai mana yang dimaksud McKinsey dan PwC (2020) sebagai usaha Indonesia dalam meratifikasi dan mereformasi model ekonomi sebagai mana negara-negara maju mengantisipasi pandemik covid 19. Alasan ini merujuk kepada penyesuaian *road map* tahun 2030 yang mensejajarkan Indonesia mencapai target pertumbuhan diatas 7%.

Industri kreatif dan UKM harus terus diupayakan berevolusi menggunakan model digital. Ditambah transformasi logistik sebagai *supply chain* yang terintegrasi dengan kondisi kepulauan Indonesia. Transformasi rantai



Edi Setiawan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

pasok memberikan angin segar kecepatan logistik sesuai kebutuhan produksi dan konsumsi. Sesuai pemikiran Kenichi Ohmae (2011) perlunya praktik produksi tepat waktu yang harus dilakukan sebuah korporasi agar rantai produksi sesuai sisi *demand* dan *supply*. Sehingga menurut Ohmae hal ini tidak menjadi ilusi bagi pertumbuhan ekonomi,

Beragam prediksi ekonomi yang menunjukkan kelesuan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya berkisar 2,5% hingga 5,5% perlu kajian serius dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintah perlu sedari awal membangun jalur logistik vaksin dan dukungan ekspansi fiskal dalam rancangan pemulihan ekonomi. Tidak hanya itu, perlu relaksasi dan dukungan *demand* dan *supply* bantuan kredit yang digulirkan harus tepat sasaran. Dukungan sisi *supply* ini harus fokus pada insentif pajak serta bantuan kredit bagi UMKM dan korporasi sebagai stimulus akselerasi katalis bagi produktifitas kerja. Hasil dari sisi ini akan memunculkan permintaan kredit modal kerja dan kredit investasi.

Pemulihan kesehatan bagian terpenting dalam mengerek perekonomian menjadi positif. Pergerakan ekonomi diyakini akan terus tumbuh bila semua *stakeholders* ikut andil dalam menggerakkan semua sektor ekonomi. Tak kalah penting, rantai pasok bahan baku ikut andil dalam proses redistribusi produksi korporasi sehingga daya beli dan produksi secara kurva dapat terdeteksi ekuilibrium.

Banyak kalangan menilai kepercayaan tinggi akan muncul bila pasar telah berkontraksi positif. Dimana beragam stimulus yang telah digulirkan serta merta mengerek daya beli yang lebih tajam akan pertumbuhan ekonomi. Bansos dan BLT hanya membatu menjaga daya beli masyarakat miskin agar tidak semakin jatuh. Sehingga angka konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sesuai data 4,04% pada triwulan III 2020 dan akan meningkat pada triwulan I tahun 2021.

Pada dasarnya konsumsi rumah tangga menjadi komponen dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara rigid. Dimana masyarakat sebagai konsumen menjadi tolak ukur dalam meningkatkan daya beli sehingga jurang resesi bisa terkendali dengan aman.

Konsumsi rumah tangga memberikan pertumbuhan belanja barang 47,48 persen angka yang fantastis bagi geliat ekonomi. Ditambah hibah bansos dan BLT meningkatkan daya beli sekitar 246,25%. Data ini meningkat dari data kuartal II/2020 yang berkontraksi membaik sebesar 5,52%.

Untuk itu, meminjam istilah Daniel Bell, perekonomian harus dimobilisasi secara baik, di mana birokrasi negara merencanakan dan mengatur semua sektor perekonomian secara efisien dan efektif. Pemberian dana bansos dan BLT sejatinya terdistribusi sesuai sasaran dengan mobilisasi yang sistematis dengan pemerintah daerah dan desa. Agar menghindari penyelewengan sasaran program, program bansos dan BLT dapat dimonitoring melalui sistem yang sudah terintegrasi sebagai stimulus daya beli masyarakat.

Kita perlu belajar dari China dan Vietnam. Dampak pandemi yang mengglobal tidak menyurutkan negara Paman Ho dan Tiongkok untuk bertransformasi menggeliatkan ekonomi dengan melakukan *efek crowding out* yaitu memberikan kredit sektor swasta yang lebih besar.

Inisiasi memberikan stimulus dan bukti nyata peningkatan daya beli sektor swasta guna menumbuhkan semua elemen ekonomi. Perlu kita belajar dalam hal ini dimana efek *crowding out* sebagai salah satu kunci peningkatan produktifitas korporasi dalam menghadapi pandemi ini. Khususnya di Indonesia, perbankan lebih terdorong membeli surat utang pemerintah dibanding memberikan stimulus kredit bagi sektor swasta. Akibatnya sektor swasta tidak ikut tumbuh dan melakukan *spending* bagi pembangunan ekonomi nasional.

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

Top Up
Uang Elektronik



Beli
Paket Data
& Pulsa



Beli Voucher
& Bayar Listrik



Bayar
Kartu Kredit



Transfer



Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

